



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

Jalan Muara Baru Ujung, Jakarta 14440
Telepon (021) 6614712, Faksimile (021) 6614712
Laman djpsdkp.kkp.go.id Email psdkp.jakarta@kkp.go.id

Nomor : B.5/PSDKPLAN.3/TU.140/II/2023 20 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
Di –
Jakarta

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rekonsiliasi dan Reviu Laporan Kinerja Jakarta tahun 2022, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pangkalan PSDKP Jakarta telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 sebagaimana terlampir;
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di aplikasi Kinerjaku pada periode Tahun 2022 diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,44%. Atas pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,44% dengan kategori "Baik" (skor 90-120%) maka dapat disimpulkan pada periode Tahun 2022 capaian kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta mengalami keberhasilan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut kami ucapkan terimakasih.

Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta

Sumono Darwinto, A.Pi, S.Pi, M.H



LAPORAN KINERJA

Abstrak

Laporan ini mencakup capaian kinerja dan anggaran serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2022"

2022

EDISI



LAPORAN KINERJA PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA



Diterbitkan oleh :
Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2022

Penyusun :
Tim Penyusun Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta

PANGKALAN PSDKP JAKARTA

Jalan Muara Baru Ujung, Jakarta 14440
Telepon : (021) 6614712
Laman : djpsdkp.kkp.go.id
Email : psdkp.jakarta@kkp.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2022 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta kepada Unit Kerja Eselon I Ditjen PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan ini juga sebagai media informasi pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta selama tahun anggaran 2022 kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Untuk mendukung reformasi birokrasi, Ditjen. PSDKP telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Pangkalan PSDKP Jakarta telah menetapkan 7 Sasaran Strategis (SS), yaitu: (1) Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan; (2) Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan; (3) Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif; (4) Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif; (5) Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; (6) Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif; (7) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Capaian kinerja pada tahun 2022 sudah memenuhi target. 23 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan Pangkalan PSDKP Jakarta telah mencapai target sesuai rencana aksi. Hal ini karena sebagian besar kegiatan yang dilakukan telah disusun dan direncanakan pada awal tahun, sehingga pelaksanaan kegiatan pada periode berjalan sudah mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan.

Anggaran yang dikelola Pangkalan PSDKP Jakarta pada Tahun 2022 sesuai DIPA Nomor : 032.05.2.440816/2022 tanggal 17 November 2021, mendapat alokasi dana sebesar Rp. 55.222.271.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) yang mengalami beberapa kali revisi sampai pada revisi terakhir dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.587.016.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Belas Ribu Rupiah). Berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2022 memperoleh nilai 108,44% "**Baik**". Realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar Rp. 34.505.303.519,- "**99,76%**".



KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu tahapan dalam siklus manajemen dalam sebuah organisasi, pelaporan mempunyai peran penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pencapaian tujuan dari organisasi. Fungsi pelaporan semakin penting seiring adanya kebijakan sistem anggaran berbasis kinerja dan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah.

Memperhatikan hal tersebut, dan dalam rangka perwujudan *good governance* diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan serta saran yang telah ditetapkan.

Dengan adanya laporan kinerja tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan di Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta dalam melaksanakan program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan diharapkan dapat membuka pemikiran lebih kreatif dari berbagai pihak tentang bagaimana meningkatkan peran dan kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta masa yang akan datang.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan Negara tentu saja laporan kegiatan ini sangat terbuka terhadapsaran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Jakarta, 20 Januari 2023
Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta



Sumono Darwinto, A.PI, S.PI, M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Isu Aktual Pengawasan SDKP Jakarta.....	2
1.4. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Jakarta	3
1.5. Wilayah Kerja.....	5
1.6. Armada Kapal Pengawas dan Speedboad Pengawas	6
1.7. Kepegawaian	8
1.8. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Kegiatan Ditjen PSDKP 2022.....	10
2.2. Rencana Kegiatan Pangkalan PSDKP Jakarta	11
2.3. Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun Anggaran 2022	12
2.4. Perjanjian Kinerja.....	14
2.5. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022.....	18
3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja.....	20
3.2.1 Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan.....	20
3.2.2 Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	29
3.2.3 Sasaran Kegiatan 3. Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif.....	38
3.2.4 Sasaran Kegiatan 4. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	41
3.2.5 Sasaran Kegiatan 5. Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP	49
3.2.6 Sasaran Kegiatan 6. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pembagian Satwas SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	6
Tabel 2.	Data Armada Kapal Pengawas	7
Tabel 3.	Data Armada Kapal Pengawas Tipe RIB & Rubber Boat	7
Tabel 4.	Data Armada Kapal Pengawas Tipe <i>Speedboat</i>	7
Tabel 5.	Data Pegawai Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	8
Tabel 6.	Perubahan Perjanjian Kinerja Semula Menjadi	14
Tabel 7.	Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta Setelah Revisi	15
Tabel 8.	Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta	18
Tabel 9.	IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (%)	21
Tabel 10.	Rekapitulasi kegiatan bimtek dan diklat terkait pengawasan sumber daya kelautan	24
Tabel 11.	Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi/atau <i>Apendik Cites</i>	24
Tabel 12.	Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut	26
Tabel 13.	IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	30
Tabel 14.	Rekapitulasi kegiatan bimtek dan diklat terkait pengawasan sumber daya perikanan.....	32
Tabel 15.	Perhitungan Penilaian Subsektor Penangkapan Ikan.....	32
Tabel 16.	Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Subsektor Penangkapan Ikan.....	33
Tabel 17.	Rekapitulasi HPK dan SLO lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2022....	34
Tabel 18.	Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Subsektor Pengolahan Ikan.....	35
Tabel 19.	Rekapitulasi Kegiatan Subsektor Pembudidaya Ikan	36
Tabel 20.	Rekapitulasi Kegiatan Subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan.....	38
Tabel 21.	Rekapitulasi Kegiatan Pembinaan POKMASWAS Tahun 2022	39
Tabel 22.	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	42
Tabel 23.	Indeks Kinerja Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas	45
Tabel 24.	IKU Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP (%).....	50
Tabel 25.	Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan.....	52
Tabel 26.	Reakpitulasi Sanksi Administratif Selama Tahun 2022	54
Tabel 27.	IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Penggunaan Layanan SLO	58
Tabel 28.	IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Penggunaan Layanan LVHPI	60

3.2.7 Sasaran Kegiatan 7. Tata Kelola Pemerintah yang Baik lingkup Ditjen	
PSDKP	57
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	86
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	87
4.2. Rekomendasi.....	87
4.3. Tindak lanjut triwulan sebelumnya	87

Tabel 29. Rekapitulasi Nilai WBK periode tahun 2021-2022.....	62
Tabel 30. Perbandingan Nilai Komponen WBK periode 2021-2022.....	62
Tabel 31. Perbandingan Indeks Profesional ASN Periode 2021-2022.....	64
Tabel 32. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta Periode 2021-2022.....	66
Tabel 33. Rekapitulasi Kegiatan Bimtek dan Diklat terkait Nilai Rekonsiliasi Kinerja.....	68
Tabel 34. Nilai Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik.....	69
Tabel 35. Nilai Unit Kerja yang Menerapkan Implementasi Budaya Kerja.....	71
Tabel 36. Rekapitulasi Kegiatan Bimtek dan Diklat terkait Implementasi Budaya Kerja....	72
Tabel 37. Lembar Kerja Penilaian Kegiatan BMN.....	72
Tabel 38. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN.....	73
Tabel 39. Lembar Kerja Penilaian Kegiatan PBJ.....	75
Tabel 40. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa.....	75
Tabel 41. Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar periode 2020-2022.....	77
Tabel 42. Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran 2022-2022.....	80
Tabel 43. Nilai Kinerja Anggaran (NKA).....	83
Tabel 44. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta per Kegiatan sampai dengan Bulan Desember 2022.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi lingkungan Pangkalan PSDKP Jakarta	4
Gambar 2. Peta sebaran wilayah kerja lingkungan UPT Pangkalan PSDKP Jakarta.....	5
Gambar 3. Komposisi jumlah pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	8
Gambar 4. Bagan sistem penyajian laporan kinerja	9
Gambar 5. Nilai Efisiensi Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2022	85

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Rekapitulasi kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan.....	22
Grafik 2. Perbandingan IKU 1 dengan Unit Kerja Lain.....	23
Grafik 3. Rekapitulasi Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan	25
Grafik 4. Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan dan Non Perikanan dalam Pengolahan Limbah yang berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungan.....	27
Grafik 5. Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan terhadap Pelarangan <i>Destructive Fishing</i>	29
Grafik 6. Perbandingan IKU 2 dengan Unit Kerja Lain	31
Grafik 7. Perbandingan IKU 3 dengan Unit Kerja Lain	41
Grafik 8. Perbandingan IKU 4 dengan Unit Kerja Lain	44
Grafik 9. Perbandingan IKU 5 dengan Unit Kerja Lain	46
Grafik 10. Perbandingan IKU 6 dengan Unit Kerja Lain	48
Grafik 11. Perbandingan IKU 8 dengan Unit Kerja Lain	53
Grafik 12. Perbandingan IKU 9 dengan Unit Kerja Lain	55
Grafik 13. Perbandingan IKU 10 dengan Unit Kerja Lain	57
Grafik 14. Perbandingan IKU 11 dengan Unit Kerja Lain	59
Grafik 15. Perbandingan IKU 12 dengan Unit Kerja Lain	61
Grafik 16. Perbandingan IKU 13 dengan Unit Kerja Lain.....	63
Grafik 17. Perbandingan IKU 14 dengan Unit Kerja Lain	65
Grafik 18. Perbandingan IKU 15 dengan Unit Kerja Lain	67
Grafik 19. Perbandingan IKU 16 dengan Unit Kerja Lain	70
Grafik 20. Perbandingan IKU 17 dengan Unit Kerja Lain	71
Grafik 21. Perbandingan IKU 18 dengan Unit Kerja Lain	74
Grafik 22. Perbandingan IKU 19 dengan Unit Kerja Lain	76
Grafik 23. Perbandingan IKU 20 dengan Unit Kerja Lain	78
Grafik 24. Perbandingan IKU 21 dengan Unit Kerja Lain	80
Grafik 25. Perbandingan IKU 22 dengan Unit Kerja Lain	82
Grafik 26. Perbandingan IKU 23 dengan Unit Kerja Lain.....	84



BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki 3 pilar utama dalam mewujudkan Laut sebagai Masa Depan Bangsa. Pencapaian ketiga pilar tersebut dilaksanakan melalui misi Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan. Ketiga misi tersebut dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang integral. Pilar kesejahteraan hanya bisa tercapai apabila pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara berdaulat dan berkelanjutan. Penjabaran ketiga misi tersebut dituangkan dalam program/kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja lingkup KKP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari KKP yang diberikan tugas dan fungsi melaksanakan misi Kedaulatan yakni dengan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2020-2024.

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta (Pangkalan PSDKP Jakarta) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Ditjen. PSDKP dalam melaksanakan misi kedaulatan. Peran tersebut secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta 2020-2024.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam

pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya pengelolaan kinerja di KKP diatur melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan pengukuran kinerja setiap triwulan dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2022 Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2022 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Pangkalan PSDKP Jakarta selama kurun waktu Januari – September 2022 dengan dasar hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja pengawasan SDKP.

1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP Jakarta

Isu strategis Pengawasan SDKP terkait beberapa kebijakan, yakni :

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan (SDK) berbasis resiko;
- b. Pengawasan Sumber Daya Perikanan (SDP) berbasis resiko;
- c. *Destructive Fishing* berupa penggunaan bom, bus, dan penyetruman kerap terjadi di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;

- d. Penangkapan dan distribusi ikan yang dilindungi (*Cites*) yang tidak memiliki dokumen perizinan;
- e. Kegiatan peredaran lobster, kepiting dan rajungan yang tidak sesuai ketentuan PERMEN KP Nomor 12 Tahun 2020;
- f. Pemanfaatan ruang laut yang harus dilengkapi oleh PKKPR di Kementerian Kelautan Perikanan (KKP)

Dengan adanya isu aktual tersebut diharapkan kegiatan Pangkalan PSDKP Jakarta selama tahun 2022 dapat mempunyai peran untuk meningkatkan tertib pelaksanaan perundang-undangan.

1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam hal wilayah kerja pengawasannya Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan ;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tercantum pada pasal 6 ayat 1 yaitu

susunan Organisasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas :

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada gambar dibawah ini:

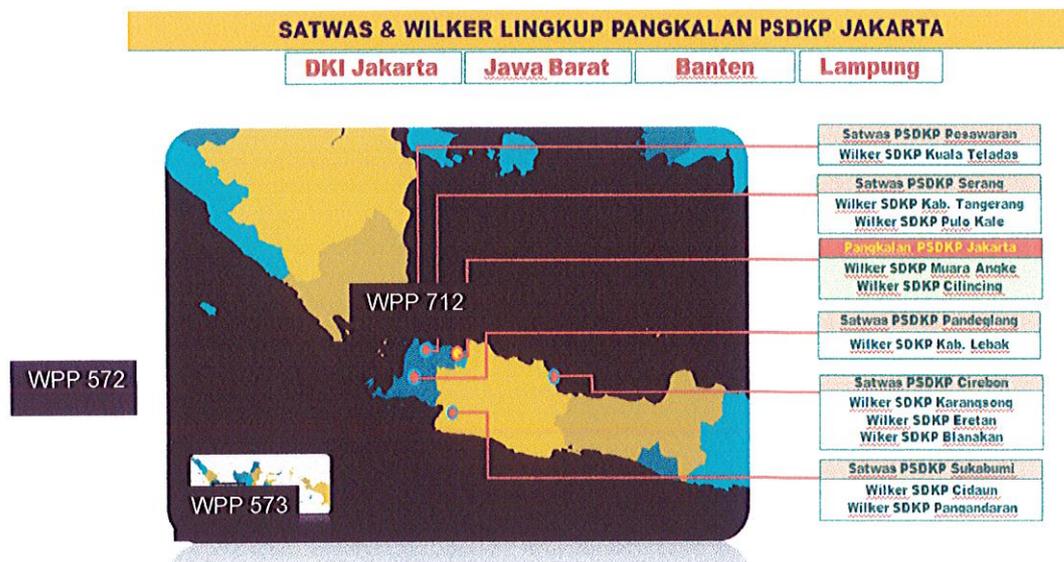


Gambar 1. Struktur Organisasi Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

1.5 Wilayah Kerja

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Pangkalan PSDKP Jakarta, merupakan *fishing ground* yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati, selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan juga menerima kapal yang ditangkap oleh kapal pengawas perikanan yang di kawal ke Pangkalan PSDKP Jakarta dari perairan ZEEI Samudera Hindia dan Perairan Laut Utara Jawa tersebar di satwas lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta.

Sebagai gambaran yang menunjukkan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta, ditampilkan peta sebaran satwas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta mulai dari selatan Pulau Sumatera sampai Jakarta. Ditunjukkan pula mengenai sebaran Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang tersebar di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta yaitu WPP 712 mencakup Perairan Utara Jawa, WPP 572 meliputi Perairan Samudera Hindia Barat Sumatera dan WPP 573 Perairan Samudera Hindia Selatan Jawa. Berikut peta sebaran wilayah kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Peta sebaran wilayah kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta

Dalam melaksanakan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta membawahi 5 Satuan Pengawasan. Satuan Pengawasan PSDKP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1. Pembagian Satwas SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	Kab. Administratif Kep. Seribu, Kota Administratif Jakarta Utara, Kota Administratif Jakarta Pusat, Kota Administratif Jakarta Timur, Kota Administratif Jakarta Barat, Kota Administratif Jakarta Selatan, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kab. Bandung Barat.
2	Satwas SDKP Pandeglang	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang
3	Satwas SDKP Pesawaran	Kab. Lampung Barat, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara, Kab. Mesuji, Kab. Pesawaran, Kab. Pesisir Barat, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Way Kanan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Pesisir Barat
4	Satwas SDKP Cirebon	Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kota Cirebon
5	Satwas SDKP Sukabumi	Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kota Pangandaran
6	Satwas SDKP Serang	Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan

Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan, Pangkalan PSDKP Jakarta juga melaksanakan pengawasan di bidang kelautan, budidaya, pengolahan dan distribusi hasil perikanan.

1.6 Armada Kapal Pengawas dan *Speedboat* Pengawas

Dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP Pangkalan PSDKP Jakarta didukung 2 (dua) unit armada kapal pengawas, 6 (enam) unit *speedboat* pengawas dan 2 (dua) unit tipe RIB & *Rubber Boat*. Rincian armada kapal pengawas, *speedboat*, RIB & *rubber boat* dilihat pada tabel dibawah ini :

Table 2. Data Armada Kapal Pengawas

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Tipe Kapal
1	Hiu 10	28 meter	Kelas IV
2	Hiu 06	28 meter	Kelas IV

Table 3. Data Armada Kapal Pengawas Tipe RIB & Rubber Boat

No	Nama Kapal	Lokasi	Ukuran Kapal
1	<i>Sea Rider</i>	Pangkalan PSDKP Jakarta	8 meter
2	<i>Rubber Boat</i>	Satwas SDKP Pandeglang	5 meter

Table 4. Data Armada Kapal Pengawas tipe Speedboat

No	Nama Kapal	Lokasi	Ukuran Kapal
1	Napoleon 006	Pangkalan PSDKP Jakarta	12 meter
2	Dolphin 004	Satwas SDKP Serang	8 meter
3	Napoleon 014	Satwas SDKP Pesawaran	12 meter
4	Dolphin 022	Satwas SDKP Cirebon	8 meter
5	Napoleon 052	Satwas SDKP Sukabumi	12 meter
6	Hiu Biru 03	Pangkalan PSDKP Jakarta	11 meter

1.7 Kepegawaian

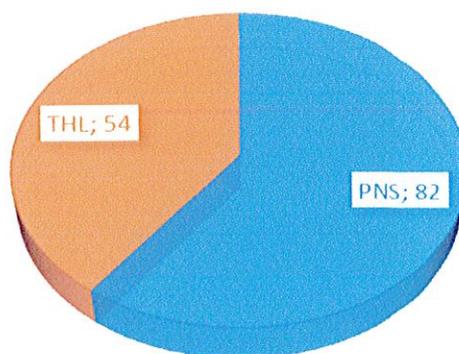
Sumber daya manusia Pangkalan PSDKP Jakarta selama tahun 2022 berjumlah 140 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 85 orang, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berjumlah 55 orang. Data pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Data Pegawai Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No	UNIT KERJA	Jumlah		TOTAL
		PNS Ditjen PSDKP	PPNPN	
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	35	33	70
2	AKP Kapal Pengawas	18	-	18
3	Satwas SDKP Pesawaran	5	3	8
4	Satwas SDKP Pandeglang	3	2	5
5	Satwas SDKP Serang	4	3	7
6	Satwas SDKP Sukabumi	6	6	10
7	Satwas SDKP Cirebon	10	8	18
8	CPNS	4	-	4
Jumlah		85	55	140

Komposisi pegawai Pangkalan PSDKP Jakarta, Satuan Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada gambar 3.

DATA PEGAWAI LINGKUP PANGKALAN PSDKP JAKARTA

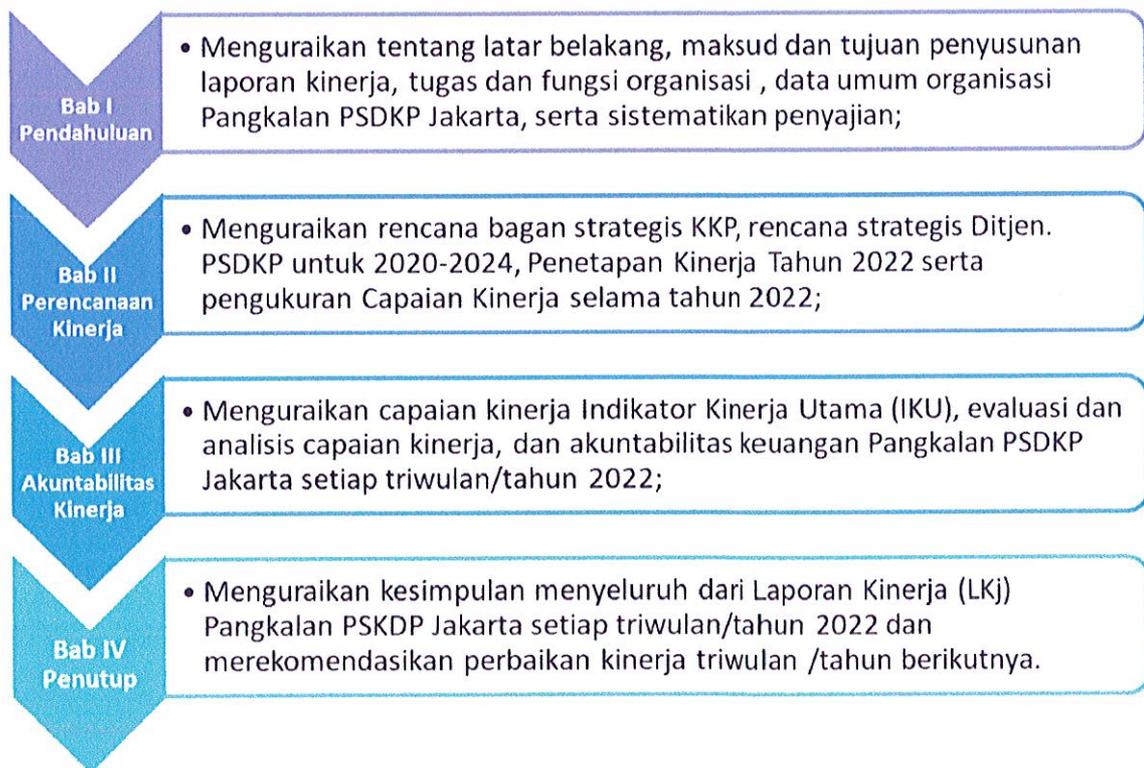


Gambar 3. Komposisi Jumlah Pegawai Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta

Dari data pada diatas menggambarkan komposisi pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang sebagian besar berstatus PNS dan sebagian berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai daerah dalam melaksanakan fungsi dan menyelesaikan tugas Pengawasan SDKP, diperlukan kesepakatan/aturan antara Dirjen PSDKP dengan Dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas pegawai tersebut serta meningkatkan kompetensi, dapat menugaskan pegawainya untuk mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan.

1.8 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2022 diuraikan pada grapik berikut :



Gambar 4. Bagan sistem penyajian laporan kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Renstra Ditjen. PSDKP 2020-2024; ⁽²⁾ Renstra Pangkalan PSDKP Jakarta 2020-2024; dan ⁽³⁾ Penetapan Kinerja Tahun 2022.

2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2020-2024. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon III, Eselon IIII dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 melalui 2 (dua) pendekatan yaitu *logical model* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas. Pada pendekatan *logical model*, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (*impact*), sasaran program (unit eselon I) yang menghasilkan (*Outcome*), dan sasaran kegiatan (unit eselon IV) yang menghasilkan keluaran (*output*). Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu:

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang professional dan partisipatif

2.2 Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta

Rencana sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2020-2024, merupakan penjabaran dari renstra Eselon I Ditjen PSDKP, dengan tujuan yang akan dicapai, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;
2. Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem informasi dan komunikasi pengawasan SDKP;
3. Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;
4. Terwujudnya ASN Pangkalan PSDKP Jakarta yang kompeten dan berkepribadian;
5. Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal dan mudah diakses di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;
6. Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi Pangkalan PSDKP Jakarta yang berkepribadian;
7. Terkelolanya anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta secara efisien.

Untuk mencapai program kerja Pengawasan SDKP maka Pangkalan PSDKP Jakarta menetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu :

- a. Melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari perusakan dan kegiatan *illegal*;
- b. Mewujudkan ketaatan para pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan;
- c. Terwujudnya industrialisasi perikanan.

Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 khususnya pada kebijakan “membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan”. Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, ditetapkan yaitu “Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara

berkelanjutan". Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 (enam) strategi *implementatif* yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi
2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut
3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (*Integrated Surveillance System/ISS*).
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP.
5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

2.3 Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun Anggaran 2022

Program Pengawasan Pengelolaan PSDKP

A. Pemantauan dan Operasi Armada

1. Kinerja Operasi Kapal Pengawas
2. Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas
3. Pemenuhan Logistik Armada Pengawas SDKP
4. POKMASWAS yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP
5. Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP
6. Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan

B. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
2. Penyelesaian Penanganan Barbuk
3. Penyelesaian Penanganan Awak Kapal
4. Pengenaan Sanksi Administratif

C. Koordinasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

1. Jenis Ikan Yang Dilindungi Yang Diawasi Sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
2. Pelaku Usaha Pengelolaan Jasa Kelautan Yang Patuh Terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku

3. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
 4. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
 5. Pelaku Usaha Perikanan Yang Bebas dari Destructive Fishing
- D. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
1. Kapal Perikanan Yang Laik Operasional
 2. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
 3. Unit Usaha Budidaya Ikan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
 4. Usaha Distribusi Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang – undangan
- E. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Taknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP
1. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan)
 3. Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta
 4. Indeks Profesionalitas ASN
 5. Nilai Rekonsiliasi Kinerja
 6. Inovasi Gugus Kerja Transformasi
 7. Kepatuhan Pengelolaan BMN
 8. Kepatuhan Pengadaan/Barang Jasa
 9. Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar
 10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 11. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

2.4 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Perjanjian kinerja telah ditetapkan pada bulan Januari 2022. Perjanjian kinerja mengalami perubahan pada tanggal 7 Desember 2022 dikarenakan terdapat kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) pada setiap satker lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perubahan perjanjian kinerja yang telah dilakukan revisi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. Perubahan Perjanjian Kinerja Semula Menjadi

No.	Perubahan	Semula	Menjadi	Keterangan
1	ISK4.1.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	-	Dihapus
2	ISK4.1.2	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	-	Dihapus
3	ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	-	Dihapus
4	Nilai Target ISK3.2.1	87,5	85	Perubahan nilai target
5	Nilai Target ISK3.2.2	87,5	85	Perubahn nilai target

Perjanjian kinerja yang telah direvisi 16 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta Setelah Revisi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%)	100
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	85
		ISK3.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	85
		ISK3.2.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP	90
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP (%)	100
		ISK3.3.2	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	80
		ISK4.1.2	Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	80
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Pendaratan Ikan) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	80
		ISK5.1.3	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	75
		ISK5.1.4	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	77
		ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	90
		ISK5.1.6	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1
		ISK5.1.7	Nilai implementasi budaya kerja (nilai)	21
		ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	75
		ISK5.1.9	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	75
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	86

		ISK5.1.11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70
		ISK5.1.12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	89
		ISK5.1.13	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	81

2.5 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan Aplikasi "Kinerjaku" yang merupakan aplikasi khusus berbasis informasi teknologi.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

Berdasarkan pengelolaan kinerja tahun 2022, capaian Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2022 meliputi 7 Sasaran Kegiatan (SK) dengan 23 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2022 ditabulasikan pada tabel dibawah ini :

Table 8. Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2022

Perspektif/sasaran startegis/Indikator Kinerja		Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 (%)
SK1.1 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan				
IKU 1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (%)	100	100	100
SK.2.1 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan				
IKU 2	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%)	100	100	100
SK.3.1 Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif				
IKU 3	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87	120	120
SK.3.2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif				
IKU 4	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	85	98,33	116
IKU 5	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	85	90,47	106
IKU 6	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP	90	90	100
SK.3.3 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan				
IKU 7	Persentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP (%)	100	100	100

IKU 8	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100
SK.4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif				
IKU 9	Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	80	100	120
IKU 10	Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	80	100	120
SK.5.1 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP				
IKU 11	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	80	89,9	112
IKU 12	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	80	92,69	116
IKU 13	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	75	85,86	114
IKU 14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	77	80,31	104
IKU 15	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	90	96,78	107
IKU 16	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1	1	100
IKU 17	Nilai implementasi budaya kerja (nilai)	21	23,01	109
IKU 18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	75	100	120
IKU 19	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	75	100	120
IKU 20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	86	96,6	112
IKU 21	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70	100	120

IKU 22	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	89	95,18	107
IKU 23	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	81	85,54	106

3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Sampai dengan tahun 2022 Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Kegiatan 1, Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan" yaitu upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan.

Usaha kelautan terdiri atas pemanfaatan kawasan konservasi perairan, mangrove, terumbu karang dan jenis ikan dilindungi, pemanfaatan produk dan jasa kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya, serta penangkapan ikan *non-destructive fishing*.

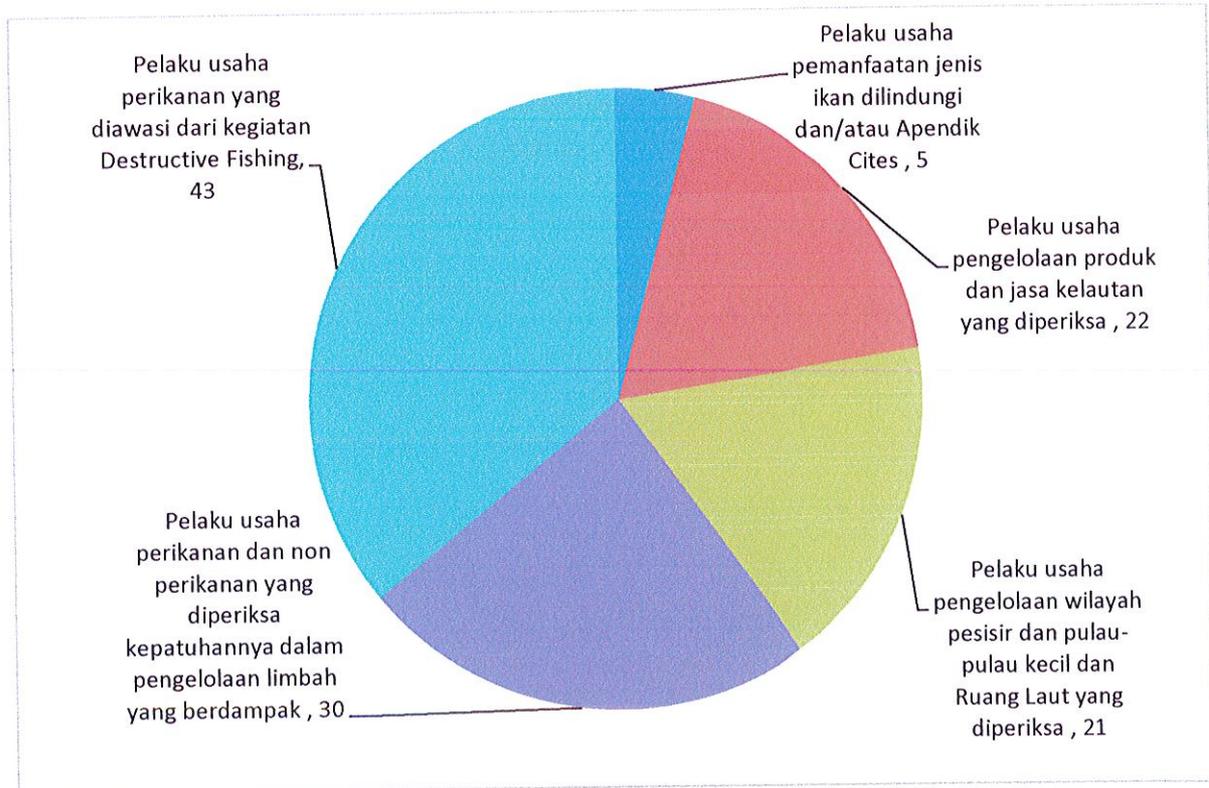
IKU 1 "Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (%)"

Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan sampai dengan bulan Juni 2022 telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian 120%. Hasil pengukuran 5 Sub-IKU yang berkontribusi pada pencapaian IKU "Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)", sebagaimana pada tabel berikut :

Table 9. IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (%)

NO	SUB IKU	2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			2024
		T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	TARGET
1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendik Cites (%)	-	-	-	95	100	120	100	100	100	100
2	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pengelolaan produk dan jasa kelautan (%)	-	-	-	95	100	120	100	100	100	100
3	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Ruang Laut (%)	-	-	-	95	100	120	100	100	100	100
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya (%)	-	-	-	95	100	120	100	100	100	100
5	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan destructive fishing (%)	-	-	-	95	100	120	100	100	100	100
	RATA-RATA	-	-	-	95	100	120	100	100	100	100

Dari data diatas, capaian IKU tahun 2022 sudah mencapai 120% dengan target sebesar 100% sehingga realisasi lebih dari target yang ditentukan. Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan sebanyak 121 pelaku usaha yang berada di lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. Hasil pengukuran pada setiap Sub-IKU pada tabel diatas sudah memenuhi tahapan pemeriksaan oleh Pengawas Perikanan yaitu Surat Perintah Tugas (SPT), Berita Acara Pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan. Berikut grafik kinerja pengawasan kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan:



Grafik 1. Rekapitulasi kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan

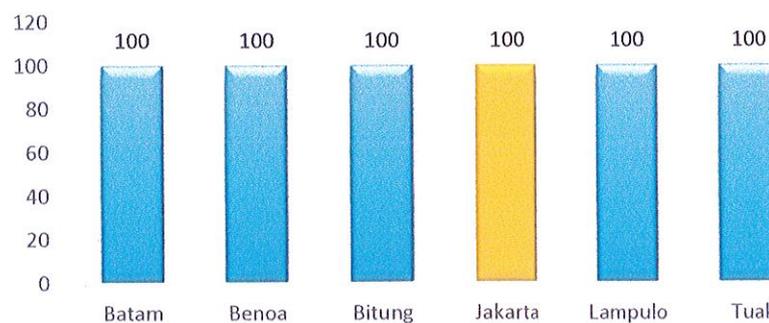
Pada grafik diatas terlihat nilai tertinggi yang dilakukan pada pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan adalah kegiatan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan *Destructive Fishing* dengan total jumlah 43 pelaku usaha. Nilai terendah adalah kegiatan pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *apendik cites* dengan jumlah 5 pelaku usaha. Total jumlah pelaku usaha sampai dengan september 2022 adalah 79 pelaku usaha.

Perbandingan dengan tahun 2021, capaian untuk kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan adalah 120% dengan jumlah pelaku usaha yang telah diawasi sebanyak 136 pelaku usaha. Berdasarkan jumlah pelaku usaha tahun lalu lebih banyak dari pada tahun ini akan tetapi secara capaian Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan kinerjanya selama tahun 2022.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 100% jika dibandingkan dengan realisasi tahun ini maka kemungkinan besar Pangkalan PSDKP Jakarta dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan kinerja seperti periode tahun 2021-2022 sehingga kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran untuk IKU “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (%)” sebesar Rp 189.640.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 189.637.625,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU 1 (100%) dan realisasi anggaran (100%) dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pengawasan sudah dilaksanakan sesuai rencana dan tidak membayarkan transport lokal untuk lokasi objek pengawasan yang berada dalam kawasan unit kerja.

Capaian IKU “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan” dengan unit kerja lain :



Grafik 2. Perbandingan IKU 1 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan seluruh UPT Pangkalan dimana seluruh UPT memiliki capaian IKU ini sebesar 100%.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah kegiatan bimbingan teknis dan diklat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. Berikut rekapitulasi kegiatan bimbingan teknis dan diklat yang dilaksanakan periode tahun 2022 :

Tabel 10. Rekapitulasi kegiatan bimtek dan diklat terkait pengawasan sumber daya kelautan

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan
1	Diklat Teknis Valuasi Kerusakan Terumbu Karang	14 - 18 Februari 2022	Pulau Pramuka, Kab. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta
2	Diklat Geographic Information System (GIS)	21 - 24 Februari 2022	Hotel Pangrango, jl. Raya Pajajaran no.1 rt.03 rw.06, Babakan, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor

IKU 1 (satu) "Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)", terdiri dari 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

1) SUB IKU 1. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Apendik Cites* (%)

Tabel 11. Rekapitulasi kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi/atau *Apendik Cites*

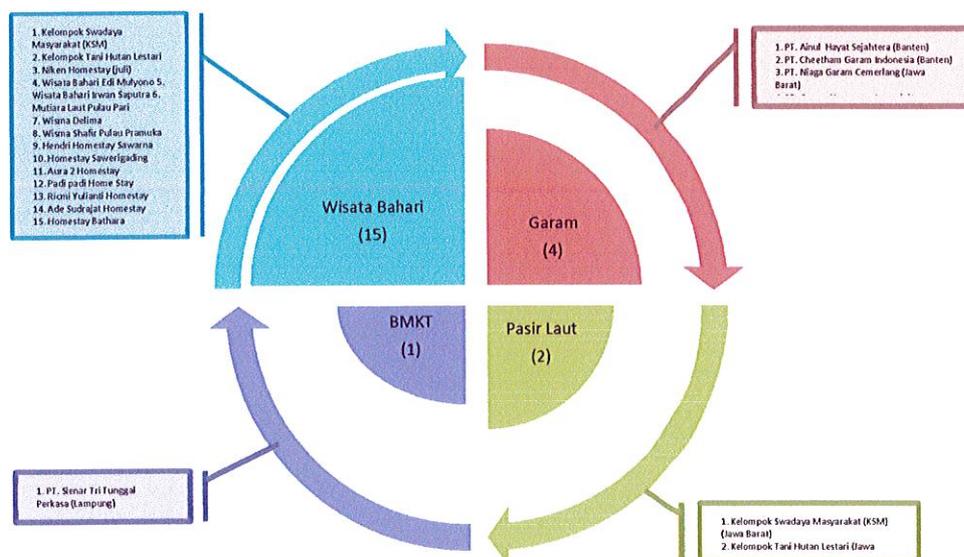
No	Pelaku Usaha	Jenis Kegiatan/Usaha yang diawasi	Lokasi	Dokumen SPT	BA Pengawasan	Laporan
				Nilai (0,1)	Nilai (0,7)	Nilai (0,2)
1	PT. Johns Aquatic	export dan import ikan hias termasuk jenis-jenis ikan dilindungi	Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi	√ (SPT No. 984/PSDKPLAN.3/K P.440/IV/2022)	√ (No. BAP.001/LAN.3/P W.240/IV/2022)	√
2	CV. Lucky Indo Aquatic	export dan import ikan hias termasuk jenis-jenis ikan dilindungi	Kec. Jati Asih, Kota Bekasi	√ (SPT No. 984/PSDKPLAN.3/K P.440/IV/2022)	√ (No. BAP.002/LAN.3/P W.240/IV/2022)	√
3	CV. Aquades Transworld	export dan import ikan hias termasuk jenis-jenis ikan dilindungi	Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi	√ (SPT No. 984/PSDKPLAN.3/K P.440/IV/2022)	√ (No. BAP.003/LAN.3/P W.240/IV/2022)	√
4	PT. Okta Viva Makmur / Tan Joshua Winardi	perdagangan hasil olahan perikanan berupa Kulit dan Sirip Ikan Pari dan Hiu	Kabupaten Serang-Banten	√ (SPT No. B.1463/PSDKPLAN.3/KP.440/VI/2022)	√ (No. 01/SRG.LAN3/PRL/ JIL/VI/2022)	√
5	PT. Debio / L. Harjanto Hardjani	Perdagangan hasil perikanan berupa tulang ikan pari dan hiu	Kab. Tangerang, Prov. Banten	√ (SPT No. B.1706/PSDKPLAN.3/KP.440/VII/2022 TANGGAL 06 JULI 2022)	√ (No. 002/SRG.A/SDK.2/ VII/2022 TANGGAL 13 JULI 2022)	√

Capaian SUB IKU “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Apendik Cites* (%)” sampai dengan tahun 2022 adalah 5 pelaku usaha. Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan pengawasan terhadap jenis ikan yang termasuk dalam kategori *Apendix cites* II dan ikan yang dilindungi yaitu antara lain arwana albino, arwana Jardini, arwana brazil, arwana silver, arwana golden, arwana banjar, arwana super red, hiu lanjaman, pari kikir, pari kupu-kupu, pari liongbun, hiu kepala martil. Pengawasan jenis ikan dilindungi ini dilaksanakan di sekitar Jawa Barat dan Banten, Kegiatan ini sudah memenuhi data dukung yang sesuai Manual IKU sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100%.

Perbandingan dengan tahun 2021, capaian untuk kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha jenis ikan dilindungi dan/atau *Apendik Cites* adalah 7 pelaku usaha dengan capaian sebesar 120%. Berdasarkan jumlah pelaku usaha tahun lalu lebih banyak dari pada tahun ini akan tetapi secara capaian Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan kinerjanya selama tahun 2022.

2) SUB IKU 2. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pengelolaan produk dan jasa kelautan (%)

Kegiatan pengawasan terkait pengelolaan produk dan jasa kelautan yang dilaksanakan Pangkalan PSDKP Jakarta sampai dengan tahun 2022 sebanyak 22 pelaku usaha dengan capaian sebesar 120%. Kegiatan pemeriksaan pengelolaan produk dan jasa kelautan yang dilaksanakan terdiri sebagai berikut :



Grafik 3. Rekapitulasi kegiatan pemeriksaan kepatuhan pengelolaan produk dan jasa kelautan

Pengawasan kegiatan pengelolaan produk kelautan terdiri dari kegiatan pengawasan pasir laut dan garam sedangkan kegiatan pengelolaan jasa kelautan terdiri dari kegiatan pengawasan BMKT dan Wisata Bahari. Berdasarkan grafik diatas, jumlah pengawasan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini sebanyak 22 pelaku usaha yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan pengawasan garam, 2 (satu) pengawasan pasir laut, 15 (lima belas) pengawasan wisata bahari dan 1 (satu) pengawasan BMKT. Pengawasan terhadap kegiatan dilaksanakan sekitar provinsi Jawa Barat, Banten, dan Lampung.

Perbandingan dengan tahun 2021, capaian untuk kegiatan pemeriksaan kepatuhan pengelolaan produk dan jasa kelautan adalah 17 pelaku usaha dengan capaian sebesar 120% sedangkan pada tahun ini terealisasi sebanyak 22 pelaku usaha dengan capaian 100%. Berdasarkan kuantitas terdapat peningkatan pada jumlah kegiatan dan secara capaian Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil memenuhi target yang ditentukan dan dapat mempertahankan kinerjanya.

3) SUB IKU 3. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Ruang Laut (%)

SUB IKU ini didapatkan dari kegiatan pengawasan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil dan ruang laut (%) selama periode tahun 2022 sebanyak 21 pelaku usaha. Hasil dari pengawasan tersebut semua pelaku usaha telah memenuhi 3 tahapan pemeriksaan dengan capaian pada SUB IKU ini sebesar 120%. Berikut pelaku usaha yang telah diperiksa oleh Pangkalan PSDKP Jakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 12. Rekapitulasi kegiatan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan ruang laut berdasarkan wilayah pengawasan

No	Lokasi Pengawasan	Pengawasan		
		Wilayah Pesisir	Wilayah Pulau Kecil	Ruang Laut
1	Provinsi Banten	3	-	7
2	Provinsi DKI Jakarta	1	7	-
3	Provinsi Jawa Barat	-	-	3
Total		4	7	10
Jumlah		21		

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 4 (empat) kegiatan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dengan 3 (tiga) kegiatan di Provinsi Banten dan 1 (satu) kegiatan di Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan pengawasan pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil sebanyak 7 (tujuh) pelaku usaha dengan lokasi pengawasan keseluruhannya berada di Provinsi DKI

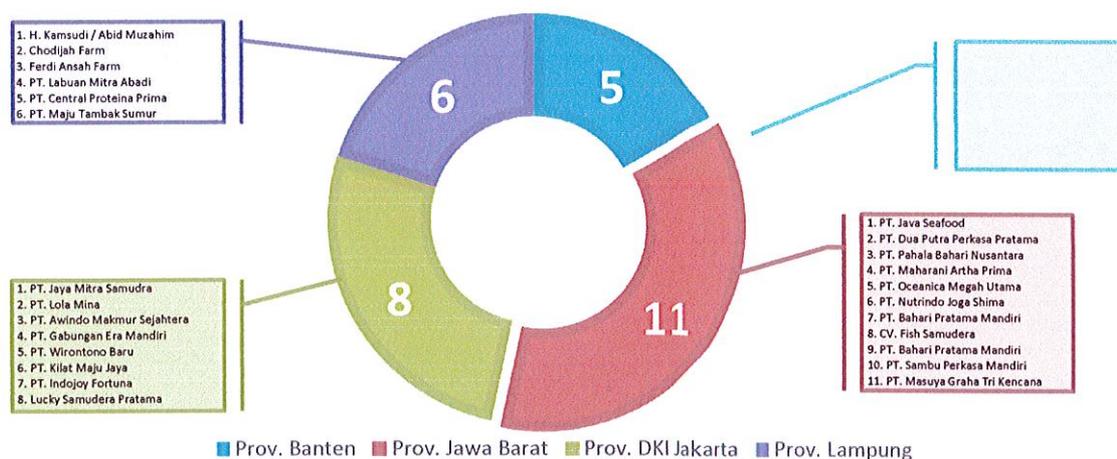
Jakarta. Kegiatan pengawasan pengelolaan ruang laut sebanyak 10 (Sepuluh) pelaku usaha dengan 7 (tujuh) kegiatan di Provinsi Banten dan 3 (Tiga) kegiatan di Provinsi Jawa Barat. Seluruh kegiatan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan ruang laut telah memiliki izin dan telah mematuhi peraturan perundang-undangan.

Perbandingan dengan tahun 2021, capaian untuk kegiatan pengawasan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil dan ruang laut adalah 18 pelaku usaha dengan capaian sebesar 120%. Pada tahun ini secara kuantitas mengalami peningkatan dan Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan kinerjanya dan secara kuantitas kegiatan ini meningkat dari tahun sebelumnya.

4) SUB IKU 4. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya (%)

SUB IKU ini didapatkan dari kegiatan pengawasan terhadap kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya. kegiatan yang mendukung IKU ini adalah pengawasan pencemaran dari usaha perikanan dan non perikanan. Hasil dari pengawasan sampai tahun 2022 didapatkan 30 pelaku usaha dan telah memenuhi 3 tahapan pemeriksaan. SUB IKU ini telah mencapai target tahun 2022 sebesar 100%. Berikut pelaku usaha yang telah diperiksa oleh Pangkalan PSDKP Jakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PENGAWASAN RUANG LAUT BERDASARKAN LOKASI



Grafik 4. Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan dan Non Perikanan dalam Pengolahan Limbah yang berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungan

Berdasarkan data diatas, 30 pelaku usaha yang diperiksa telah memenuhi 3 tahapan pemeriksaan sehingga capaian untuk kegiatan ini sebesar 120%. Kegiatan pengawasan dilaksanakan sekitar Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Kegiatan pengawasan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya paling banyak dilakukan di provinsi Jawa Barat sebanyak 11 pelaku usaha. Keseluruhan pelaku usaha memiliki izin atas pengolahan limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perbandingan dengan tahun 2021, capaian untuk kegiatan pengawasan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengolahan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungan adalah 34 pelaku usaha dengan capaian sebesar 120%. Berdasarkan kuantitas kegiatan ini mengalami penurunan, akan tetapi secara capaian Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan kinerja sampai dengan tahun ini.

5) SUB IKU 5. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing* (%)

Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan kegiatan pengawasan *Destructive Fishing* sebanyak 43 pelaku usaha dengan capaian 120%. Pelaku usaha yang diperiksa merupakan perorangan/ badan yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal/ perahu berukuran < 10 GT. Penangkapan ikan dilakukan dengan cara yang tidak merusak yaitu penangkapan tidak menggunakan bom, bius/ racun dan setrum. Parameter verifikasi pelaku usaha yang diawasi sebagaimana berikut:

- ✓ Muatan kapal tidak ditemukan alat dan bahan peledak, alat dan bahan pembius, alat dan bahan penyetrum
- ✓ Ikan hasil tangkapan tidak menunjukkan tanda-tanda terkena bom atau racun/bius

Pada tahun 2022, pelaku usaha yang diperiksa sebanyak 43 pelaku usaha dengan intensitas tertinggi terdapat pada bulan Oktober dengan jumlah pengawasan sebanyak 13 pelaku usaha. Seluruh kegiatan pemeriksaan telah memenuhi parameter verifikasi sehingga dapat dikatakan keseluruhannya patuh terhadap perundang-undangan. Kegiatan pengawasan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing* dilaksanakan di daerah sekitar Serang, Jawa Barat, dan Lampung telah memenuhi 3 tahapan pemeriksaan.

Berikut rekapitulasi kegiatan pengawasan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing* :



grafik 5. Rekapitulasi kegiatan pengawasan usaha perikanan terhadap pelarangan *destructive fishing*

Perbandingan dengan tahun 2021, capaian untuk kegiatan pengawasan *Destructive Fishing* adalah 60 pelaku usaha dengan capaian sebesar 120%. Berdasarkan kuantitas kegiatan ini mengalami penurunan, akan tetapi secara capaian Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan kinerja sampai dengan tahun ini.

3.2.2 Sasaran Kegiatan 2, Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan

Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran. Usaha perikanan meliputi subsektor penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan.

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan teknis dan laporan pelaku usaha.

IKU 2 "Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%)"

Pada periode ini, IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta terealisasi sebesar 100 %. Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan pengawasan pelaku usaha perikanan yang terdiri dari 4 kegiatan Sub IKU diantaranya adalah :

1. Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Penangkapan Ikan;
2. Persentase Penyelesaian Kepatuhan Subsektor Pengolahan Ikan;
3. Persentase Penyelesaian Kepatuhan Subsektor Pembudidayaan Ikan;
4. Persentase Penyelesaian Kepatuhan Subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan.

IKU Jumlah Unit Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan terdiri dari 4 (empat) Sub IKU, sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Table 13. IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%)

No	SUB IKU	2020			2021			2022			2024
		T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
1	Persentase Kapal perikanan yang diperiksa laik operasional (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap Peraturan Perundangan – Undang-an (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Unit Usaha Budidaya hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya Terhadap Peraturan Perundang – undangan (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Usaha Distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya Terhadap Peraturan Perundang - Undang-an. (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100

Dari data diatas, capaian IKU pelaku usaha perikanan tahun 2022 sudah mencapai 100% dengan target sebesar 100% sehingga realisasi sesuai dengan target. Berdasarkan kuantitas Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan pengawasan pelaku usaha perikanan sebanyak 424 KBLI. Seluruh KBLI yang diperiksa telah dilakukan tahapan pemeriksaan. Lokasi pengawasan dilaksanakan di sekitar wilayah Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat.

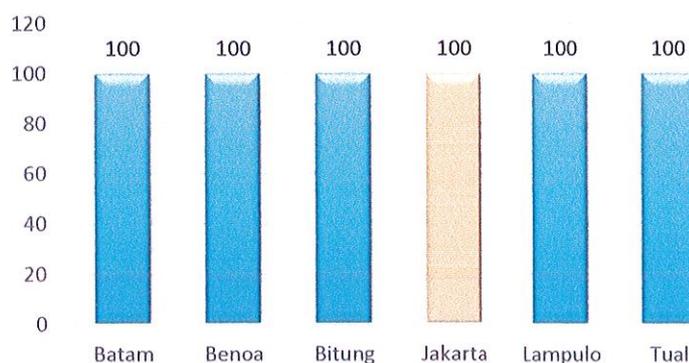
Perbandingan dengan tahun 2021, capaian untuk kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan adalah 100% dengan dengan satuan perhitungan jumlah pelaku usaha yang telah dilakukan pemeriksaan. Pada tahun 2022, satuan perhitungan adalah jumlah KBLI yang telah dilakukan pemeriksaan sehingga IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan mempunyai satuan perbandingan yang berbeda. Berdasarkan capaian IKU, Pangkalan PSKDP Jakarta telah berhasil

mempertahankan kinerja yaitu 100%, meskipun terdapat perbedaan pada perhitungan IKU sesuai dengan PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 100% jika dibandingkan dengan realisasi tahun ini maka kemungkinan besar Pangkalan PSDKP Jakarta dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan kinerja seperti periode tahun 2021-2022 sehingga kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar Rp 1.252.510.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.249.501.335,- (99,8%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,8% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien karena kegiatan pengawasan sudah dilaksanakan sesuai rencana dan adanya penggabungan kegiatan pengawasan UPI dengan pengawasan distribusi pada periode ini.

Capaian IKU "Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan" pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU "Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan" dengan unit kerja lain :



Grafik 6. Perbandingan IKU 2 dengan unit kerja lain

Grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan seluruh UPT Pangkalan dimana seluruh UPT memiliki capaian IKU ini sebesar 100%.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah kegiatan bimbingan teknis dan diklat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya

kelautan. Berikut rekapitulasi kegiatan bimbingan teknis dan diklat yang dilaksanakan periode tahun 2022 :

Tabel 14. Rekapitulasi kegiatan bimtek dan diklat terkait pengawasan sumber daya perikanan

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan
1	Bimbingan Teknis Pengawasan Standar Usaha Subsektor Pembudidayaan Ikan	15 - 19 Februari 2022	Hotel Aryaduta Makasar, Jl. Somba Opu no.297 Makasar, Prov. Sulawesi Selatan
2	Bimbingan Teknis Pengawasan Distribusi Benih Bening Lobster	9-12 Maret 2022	Hotel Ibis Style Bogor, Jl. Raya Pajajaran no. 37 rt.03 rw.08 Babakan, Kec. Bogor tengah, Kota Bogor

IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta mendukung 4 (empat) kegiatan Sub IKU yaitu sebagai berikut :

1) SUB IKU 1. Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Penangkapan Ikan (%)

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan yaitu upaya pengawasan KBLI subsektor penangkapan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor penangkapan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor penangkapan ikan, sebagaimana tabel di bawah:

Table 15. Perhitungan Penilaian Subsektor Penangkapan Ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,7	- Berita Acara Pemeriksaan - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan Data Dukung Hasil Pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Berdasarkan manual IKU, kapal perikanan yang diperiksa laik operasional adalah kapal perikanan yang telah memenuhi tahapan pemeriksaan sebagaimana pada tabel diatas. Realisasi pemeriksaan kepatuhan subsektor Penangkapan pada tahun 2022 adalah 100% dengan jumlah KBLI yang telah diperiksa sebanyak 5 KBLI. Berikut rekapitulasi kegiatan pengawasan subsektor penangkapan ikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 16. Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Subsektor Penangkapan Ikan

No.	Pelaku Usaha	Kode KBLI	Keterangan	Nilai	SPT	BA	Laporan
					0,15	0,7	0,15
1	PT. Kita Mantap Jaya	03111	Wilayah penangkapan Laut Lepas Samudera Hindia	98,7	√	√	√
2	PT. Karya Marine Jaya	03111	Wilayah penangkapan Laut Lepas Samudera Hindia	98,7	√	√	√
3	PT. Karya Marine Jaya	03111	Wilayah penangkapan Laut Natuna	98,8	√	√	√
4	PT. Kilat Maju Jaya	03111	Wilayah penangkapan Laut Lepas Samudera Hindia	98,7	√	√	√
5	PT. Kilat Maju Jaya	03111	Wilayah penangkapan Laut Lepas Samudera Hindia	98,8	√	√	√

Berdasarkan PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021, nilai kepatuhan pelaku usaha diatas 70% dikatakan “Baik Sekali”, dari tabel diatas diketahui bahwa nilai kepatuhan pelaku usaha yang diperiksa Pangkalan PSDKP Jakarta lebih dari 70% sehingga dikatakan “Baik sekali”.

Realisasi kinerja terkait penangkapan ikan juga didapatkan dari frekuensi kapal. Frekuensi kapal Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2020 sebanyak 4381 kapal perikanan. Kegiatan ini tidak termasuk dalam target akan tetapi masuk ke dalam kinerja pengawasan terkait kepatuhan kapal perikanan. Kapal perikanan tersebut melakukan aktivitas/kegiatan yang diantaranya melakukan pengurusan SLO, HPK A, dan HPK B. Berikut rekapitulasi SLO, HPK A dan HPK yang telah diterbitkan Pangkalan PSDKP Jakarta:

Tabel 17. Rekapitulasi HPK dan SLO Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2022

No	Wilayah Kerja	Jumlah		
		HPK A	HPK B	SLO
1	Pangkalan PSDKP Jakarta (MB)	3448	3466	3314
2	Wilayah kerja PSDKP Muara Angke	5293	5317	5052
3	Satuan pengawasan SDKP Serang	1034	1097	1083
4	Wilayah kerja Kabupaten Serang	0	0	0
5	Satuan pengawasan SDKP Sukabumi	619	618	614
6	Wilayah kerja PSDKP Pangandaran	253	261	175
7	Satuan pengawasan SDKP Pandeglang	423	1052	515
8	Satuan pengawasan SDKP Cirebon	573	628	520
9	Wilayah kerja PSDKP Karangsong	1078	1241	1182
10	Wilayah kerja PSDKP Eretan	638	769	644
11	Wilayah kerja PSDKP Blanakan	278	450	277
12	Satuan pengawasan SDKP Pesawaran	2445	2401	2404
	Jumlah	16.082	17.300	15.780

Pada tabel diatas dapat diketahui dari jumlah kapal sebanyak 4381 kapal perikanan telah melakukan pengurusan SLO, HPK A dan HPK B. Diketahui 15.780 SLO telah diterbitkan selama tahun 2022. HPK A telah diterbitkan Pangkalan PSDKP Jakarta sebanyak 16.082.

Perbandingan dengan tahun 2021, perhitungan tahapan pemeriksaan adalah jumlah frekuensi kapal yang telah dilaporkan pada aplikasi SIMWASKAN yaitu sebesar 5196 kapal perikanan. Pada tahun 2022, perhitungan tahapan pemeriksaan adalah jumlah KBLI pada subsektor penangkapan ikan yaitu 5 KBLI sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021. Berdasarkan capaian kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan Ikan sebesar 100%, sehingga dapat dikatakan Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan kinerjanya.

2) SUB IKU 2. Persentase Penyelesaian Kepatuhan Subsektor Pengolahan Ikan

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan yaitu upaya pengawasan KBLI subsektor pengolahan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Tabel 18. Rekapitulasi kegiatan pengawasan subsektor pengolahan ikan

No	kode KBLI	Nama KBLI	Jumlah KBLI	Lokasi Pengawasan
1	10211	Industri Penggaraman/Pengirangan Ikan	2	DKI Jakarta
2	10212	Industri Pemanggangan/Pengasapan Ikan	3	Jawa Barat
3	10213	Industri Pembekuan Ikan	26	Lampung, DKI Jakarta dan Jawa Barat
4	10214	Industri Pemindangan Ikan	1	Jawa Barat
5	10216	Industri Daging Lumatan dan Surimi	4	DKI Jakarta dan Jawa Barat
6	10217	Industri Pendinginan/Pengesan	12	DKI Jakarta dan Jawa Barat
7	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	18	DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat
8	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam kaleng	5	Jawa Barat
9	10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air lainnya	1	Jawa Barat
10	10292	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	2	Jawa Barat
11	10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	22	DKI Jakarta, Lampung, Banten dan Jawa Barat
12	10297	Industri Pendinginan / Pengesan Biota Air Lainnya	6	DKI Jakarta dan Jawa Barat
13	10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	2	DKI Jakarta dan Jawa Barat
14	10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	8	Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung
15	10794	Industri krupuk. Kripik, peyek dan sejenisnya	1	Jawa Barat
16	46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	7	DKI Jakarta dan Jawa Barat
17	46234	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	2	DKI Jakarta
		Jumlah	122	

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa terdapat 122 KBLI selama pengawasan kegiatan ini. Terdapat 17 jenis usaha/kode KBLI pada tahun 2022. Kode KBLI paling banyak pada kegiatan penyelesaian kepatuhan subsektor pengolahan ikan adalah “Industri Pembekuan Biota Air Lainnya” dengan kode KBLI 10293. Lokasi pengawasan dilaksanakan disekitar Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Lampung. Seluruh kegiatan

pengawasan telah dilakukan tahapan pemeriksaan oleh pengawas perikanan. Berdasarkan tahapan pemeriksaan 122 KBLI telah terpenuhi sehingga realisasi pada tahun 2022 sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

Pada tahun 2021, satuan perhitungan tahapan pemeriksaan adalah jumlah unit usaha yaitu sebesar 103 unit usaha. Pada tahun 2022, satuan perhitungan tahapan pemeriksaan adalah jumlah KBLI pada subsektor penangkapan ikan yaitu 122 KBLI sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021. Akan tetapi berdasarkan capaian, Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan kinerjanya dengan nilai capaian sebesar 100%.

3) SUB IKU 3. Persentase Penyelesaian Kepatuhan Subsektor Pembudidaya Ikan

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan yaitu upaya pengawasan KBLI subsektor pembudidayaan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Realisasi kegiatan pengawasan subsektor pembudidaya ikan sampai dengan September 2021 sebanyak 171 KBLI. Pengawasan dilaksanakan di Jawa Barat dan Banten. Berikut rekapitulasi kegiatan pengawasan usaha subsektor budidaya:

Table 19. Rekapitulasi Kegiatan Subsektor Pembudidaya Ikan

No	Kode KBLI	Nama KBLI	Jumlah	Lokasi Pengawasan
1	3211	Pembesaran ikan/pisces bersirip di laut	1	Lampung
2	3212	Pembenihan Ikan Laut	8	Jawa Barat, Banten dan Lampung
3	3213	Budidaya Ikan Hias Air Laut	1	Jawa Barat
4	3214	Budidaya Karang (Coral)	1	DKI Jakarta
5	3216	Pembesaran Crustacea Laut	15	Jawa Barat, Banten dan Lampung
6	3219	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	2	Lampung
7	3221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	14	Jawa Barat
8	3222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	1	Jawa Barat
9	3223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	1	Banten
10	3225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	13	Banten, Jawa Barat, dan Lampung
11	3226	Pembenihan Ikan Air Tawar	4	Jawa barat dan Lampung
12	3227	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	2	Jawa barat dan Lampung
13	3229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	12	Jawa barat dan Lampung
14	3243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	1	Lampung

15	3251	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	7	Jawa Barat
16	3252	Pembenihan Ikan Air Payau	3	Banten, Jawa Barat, dan Lampung
17	3254	Pembesaran Crustacea Air Payau	78	DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Lampung
21	3255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	1	Lampung
22	3259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	4	Jawa Barat dan Lmapung
23	3261	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	1	Lampung
TOTAL			171	

Berdasarkan data diatas, terdapat 171 KBLI. Terdapat 23 (dua puluh tiga) jenis kode KBLI pada tahun 2022. Kode KBLI terbanyak pada kegiatan pengawasan ini adalah 3254 yaitu kegiatan "Pembesaran Crustacea Air Payau". Lokasi pengawasan pada kegiatan ini adalah wilayah sekitar provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung dan Jawa Barat. Seluruh kegiatan pengawasan telah dilakukan tahapan pemeriksaan oleh pengawas perikanan. Berdasarkan tahapan pemeriksaan 171 KBLI telah terpenuhi sehingga realisasi pada tahun 2022 sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

Pada tahun 2021, satuan perhitungan tahapan pemeriksaan adalah jumlah unit usaha yaitu sebesar 156 unit usaha. Pada tahun 2022, satuan perhitungan tahapan pemeriksaan adalah jumlah KBLI pada subsektor penangkapan ikan yaitu 171 KBLI sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021. Akan tetapi berdasarkan capaian, Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan kinerjanya dengan nilai capaian sebesar 100%.

4) SUB IKU 4. Persentase Penyelesaian Kepatuhan Subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan yaitu upaya pengawasan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Realisasi pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan pada tahun 2022 adalah 100% dengan jumlah KBLI yang telah diperiksa sebanyak 126 KBLI. Berikut rekapitulasi kegiatan pengawasan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan

NO	KODE KBLI	NAMA KBLI	JUMLAH KBLI	LOKASI PENGAWASAN
1	46324	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	35	DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Lampung
2	47753	Perdagangan Eceran Ikan Hias	1	Jawa Barat
3	50133	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	11	DKI Jakarta, Lampung, dan Banten
4	50142	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus	8	DKI Jakarta
5	46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	61	DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Lampung
6	47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	9	Banten dan Jawa Barat
7	477253	Perdagangan Eceran Ikan Hias	1	Jawa Barat
TOTAL			126	

Berdasarkan data diatas, terdapat 126 KBLI yang dilaksanakan Pangkalan PSKDP Jakarta pada 3 lokasi pengawasan yaitu sekitar provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat. Selama tahun 2022, terdapat 7 jenis KBLI yang telah dilakukan pengawasan dan telah melalui tahapan pemeriksaan oleh pengawas perikanan. Kegiatan yang paling banyak selama pengawasan ini adalah perdagangan besar hasil perikanan dengan kode KBLI 46206.

Pada tahun 2021, satuan perhitungan tahapan pemeriksaan adalah jumlah unit usaha yaitu sebesar 212 unit usaha. Pada tahun 2022, satuan perhitungan tahapan pemeriksaan adalah jumlah KBLI pada subsektor penangkapan ikan yaitu 126 KBLI sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021. Akan tetapi berdasarkan capaian, Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan kinerjanya dengan nilai capaian sebesar 100%.

3.2.3 Sasaran Kegiatan 3, Terselenggaranya pengawasan system berbasis masyarakat partisipatif

IKU 3 "Persentase POKMASWAS yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)"

Kelompok Masyarakat Pengawas atau disingkat POKMASWAS adalah kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam mendukung kegiatan pengawasan SDKP. Pokmaswas merupakan mitra pengawas perikanan melalui laporan atau informasi adanya IUU Fishing di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. IKU "Persentase POKMASWAS yang aktif yang mendukung pengawasan SDKP (%)" ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan SDKP.

Pada tahun 2022, kegiatan terkait “Persentase POKMAWAS yang aktif mendukung pengawasan SDKP” sudah dilaksanakan Pangkalan PSDKP Jakarta dengan melaksanakan pembinaan terhadap POKMASWAS. Pembinaan telah dilaksanakan terhadap 26 Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang tersebar dari wilayah sekitar provinsi Lampung, Banten dan Jawa Barat. Hasil pembinaan telah di laporkan kepada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS/form keaktifan POKMASWAS. Target yang telah ditentukan selama tahun 2022 adalah 14, sehingga dapat disimpulkan capaian IKU kegiatan ini lebih dari 120%. Berikut rekapitulasi kegiatan pembinaan POKMASWAS selama tahun 2022:

Tabel 21. Rekapitulasi Kegiatan Pembinaan POKMASWAS Tahun 2022

No	Nama Pokmaswas	Jenis Kegiatan	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Pokmaswas Matahari	Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas	Lembur Pakuan Sukadaya Subang Kabupaten Subang, 23 Juni 2022
2	Pokmaswas Himpunan Nelayan Jatiluhur	Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas	Lembur Pakuan Sukadaya Subang Kabupaten Subang, 23 Juni 2022
3	Pokmaswas Hurip sukasari	Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas	Lembur Pakuan Sukadaya Subang Kabupaten Subang, 23 Juni 2022
4	Pokmaswas Curug Sindang Sukatani	Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas	Lembur Pakuan Sukadaya Subang Kabupaten Subang, 23 Juni 2022
5	Pokmaswas Jaya Bahari	Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas	Balai Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, 02 Juli 2022
6	Pokmaswas Mitra Harapan	Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas	Balai Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, 02 Juli 2022
7	Pokmaswas Duta laksana Bahari	Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas	Balai Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, 02 Juli 2022
8	Pokmaswas Jaga Raksa	Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas	Balai Desa Cikidang bayangbang Kab. Cianjur, 20 Juli 2022
9	Pokmaswas Baruna Jaya	Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas	Balai Desa Cikidang bayangbang Kab. Cianjur, 20 Juli 2022
10	Pokmaswas Patok Beusi	Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas	Balai Desa Cikidang bayangbang Kab. Cianjur, 20 Juli 2022
11	Pokmaswas Jaga Baya	Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas	Balai Desa Cikidang bayangbang Kab. Cianjur, 20 Juli 2022
12	Pokmaswas Mitra Mandiri	Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas	Balai Desa Cikidang bayangbang Kab. Cianjur, 20 Juli 2022
13	Pokmaswas Putra Mandiri	Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas	Balai Desa Cikidang bayangbang Kab. Cianjur, 20 Juli 2022
14	Paku Banten	Kegiatan Pembinaan Pokmaswas	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
15	Hurip Cinta Bahari	Kegiatan Pembinaan Pokmaswas	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

16	Banyu Biru	Kegiatan Pembinaan Pokmaswas	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
17	Dewa Mas	Kegiatan Pembinaan Pokmaswas	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
18	Cidadap	Kegiatan Pembinaan Pokmaswas	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat
19	Nusa Manuk	Kegiatan Pembinaan Pokmaswas	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat
20	Kalapagenep	Kegiatan Pembinaan Pokmaswas	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat
21	Mandalajaya	Kegiatan Pembinaan Pokmaswas	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat
22	Sindangjaya	Kegiatan Pembinaan Pokmaswas	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data diatas dapat diketahui kegiatan pembinaan dilaksanakan pada sekitar wilayah Provinsi Lampung, Banten dan Jawa Barat sebanyak 22 Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Kegiatan ini juga melibatkan narasumber antara lain Komisi IV DPR RI, Ditjen PSDKP, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Direktur PPSDP, Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, Bupati daerah setempat, dan Camat daerah setempat.

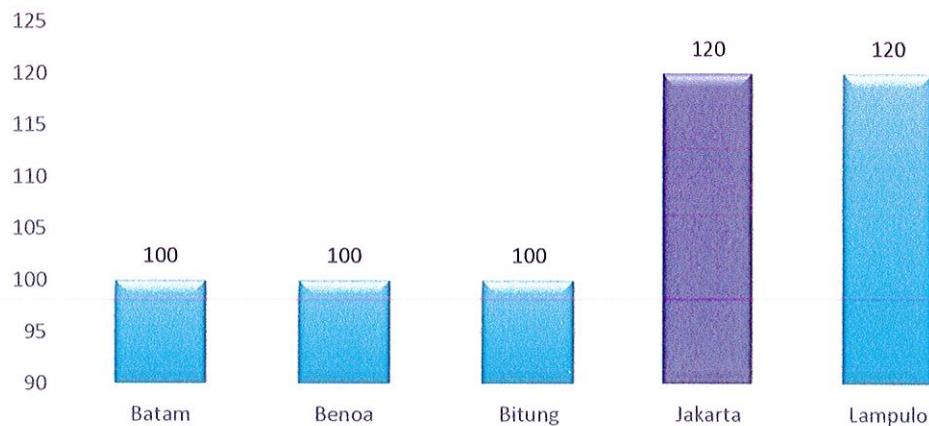
Kegiatan persentase ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun ini pengukuran merupakan kegiatan pembinaan kepada POKMASWAS sedangkan pada tahun 2021 pengukuran merupakan tindak lanjut pengaduan yang masuk ke Pangkalan PSDKP Jakarta.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, kegiatan pembinaan POKMASWAS belum ada, sehingga diperlukan adanya reviu Renstra 2020-2024 untuk mendukung kegiatan ini. Reviu Renstra 2020-2024 akan dilaksanakan pada 2023 untuk menunjukkan IKU sebelumnya sudah tidak relevan dengan perjanjian kinerja tahun 2022.

Alokasi anggaran untuk IKU "Persentase POKMASWAS yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%) sebesar Rp. 763.630.000,-. Realisasi anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 749.639.788,- sehingga telah tercapai 98,17%. Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 120% dan realisasi anggaran sebesar 98,17% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU "Persentase POKMAWAS yang aktif mendukung pengawasan SDKP" pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU "Persentase POKMAWAS yang aktif mendukung

pengawasan SDKP” dengan unit kerja lain :



Grafik 7. Perbandingan IKU 3 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta lebih tinggi dari 4 (empat) yang lain. Capaian IKU ini sama dengan UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Tingginya capaian IKU ini dikarenakan banyaknya POKMASWAS yang aktif di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta sebanyak 22 kelompok dari target 14 kelompok.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya koordinasi yang intensif dengan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada untuk melaksanakan rencana sosialisasi dan pembinaan POKMASWAS yang melibatkan seluruh instansi lingkup Ditjen PSDKP.

3.2.4 Sasaran Kegiatan 4, Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

Dalam rangka pencapaian SK “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasi IKU, sebagai berikut :

IKU 4 “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
7. Jumlah Pemutusan/pengangkatan Rumpon Ilegal;
8. Jumlah kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, Internasional dan dukungan Kegiatan Sosial/SAR;
9. Jumlah pengawasan di kawasan konservasi, destructive fishing dan pelanggaran kelautan lainnya.

Indeks kinerja operasi kapal pengawas Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2022 adalah 98,33 dengan target yang telah ditentukan sebesar 85, sehingga nilai capaian IKU ini sebesar 116%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai target pada tahun 2022, dikarenakan pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas telah sesuai dengan rencana operasi yang telah direncanakan. Kesesuaian tersebut tidak lepas dari peran serta tim perencanaan yang selalu berkoordinasi dengan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada untuk mengetahui perhitungan yang sesuai dengan manual iku. Berikut nilai indeks kinerja operasi kapal pengawas tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 22. Indeks Kinerja Kapal Pengawas

NO	INDEKS KINERJA OPERASI KAPAL PENGAWAS	KAPAL PENGAWAS					
		KP. HIU 10			KP. HIU 06		
		TARGET	REALISASI	NILAI	TARGET	REALISASI	NILAI
1	Kapal Perikanan yang Diperiksa (20%)	90	109	20	90	101	20
2	Coverage Area Pengawasan (15%)	0.22	0.27	15	0.22	0.30	15
3	Capaian Hari Operasi (15%)	45	51	15	45	50	15
4	Tindak Lanjut Target Operasi (10%)	0	0	10	0	0	10
5	Jumlah Tangkapan Illegal Fishing (10%)	3	4	10	3	2	6.67
6	Jumlah Penyitaan Alkap Terlarang (10%)	2	2	10	2	2	10
7	Jumlah Pemutusan Rumpon Ilegal (10%)	0	0	10	0	0	10
8	Dukungan Kegiatan Tertentu (SAR, Ops Bersama) (5%)	0	0	5	0	0	5
9	Pengawasan Kawasan Konservasi (5%)	0	0	5	0	0	5
TOTAL NILAI INDEKS				100	96.67		
INDEKS KINERJA (RATA-RATA)				98.33			

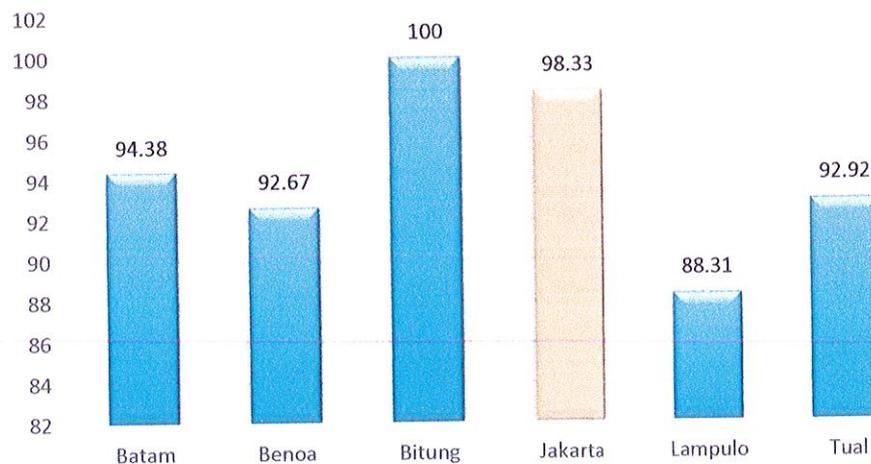
Berdasarkan tabel diatas, terdapat nilai indeks dari armada kapal pengawas Pangkalan PSKDP Jakarta yaitu KP. Hiu 10 dan KP Hiu 06 dengan nilai 98,33. Pada kapal pengawas Hiu 10, indeks sudah terpenuhi sesuai dengan target, sedangkan pada kapal pengawas Hiu 06 terdapat indeks yang tidak memenuhi target yaitu jumlah tangkapan *illegal fishing*. Indeks yang tidak terpenuhi pada kapal Hiu 06 dikarenakan adanya faktor cuaca yang kurang mendukung, sehingga kapal tidak maksimal untuk berlayar jauh. Faktor tersebut mempengaruhi 1 indeks pendukung dari total nilai indeks, akan tetapi nilai tersebut tetap memenuhi target secara keseluruhan.

IKU indeks kinerja kapal pengawas merupakan IKU baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, IKU yang terkait perhitungan kinerja kapal pengawas adalah Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%).

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, kegiatan indeks operasi kapal pengawas belum ada, sehingga diperlukan adanya reuiu Renstra 2020-2024 untuk mendukung kegiatan ini. Pada renstra IKU yang ditetapkan adalah Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%). IKU tersebut merupakan persentase hasil perbandingan frekuensi operasi kapal pengawas, periode operasi kapal pengawas, jangkauan pemantauan melalui radar Kapal Pengawas (nm), kecepatan dinas (nm/jam), lama waktu pengawasan (jam), faktorkoreksiaktual WPPNRI, faktor koreksi aktual kapal pengawas dengan Luas area WPPNRI. Reuiu Renstra 2020-2024 akan dilaksanakan pada 2023 untuk menunjukkan IKU sebelumnya sudah tidak relevan dengan perjanjian kinerja tahun 2022.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas sebesar Rp 6.835.525.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.827.801.001,- (99,89%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 116% dan realisasi anggaran sebesar 99,89% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Bena, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” dengan unit kerja lain :



Grafik 8. Perbandingan IKU 4 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta lebih tinggi dari 4 (empat) UPT yang lain akan tetapi lebih rendah dari UPT Pangkalan PSDKP Bitung. Hal ini dikarenakan terdapat komponen yang tidak tercapai pada perhitungan kegiatan ini yaitu komponen jumlah tangkapan *illegal fishing*.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya rapat monitoring dan evaluasi tahun 2022 yang terkait penyusunan rencana operasi kapal dan *speedboat* tahun 2022 yang diikuti seluruh Satker pusat dan UPT lingkup Ditjen PSKDP.

IKU 5 “Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas”

Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni :

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku *IUU Fishing*;
5. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;

Indeks kinerja operasi *speedboat* pengawas Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2022 adalah 90,47 dengan target yang telah ditentukan sebesar 85, sehingga nilai capaian

IKU ini sebesar 106%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai target pada tahun 2022, dikarenakan pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas telah sesuai dengan rencana operasi yang telah direncanakan. Kesesuaian tersebut tidak lepas dari peran serta tim perencanaan yang selalu berkoordinasi dengan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada untuk mengetahui perhitungan yang sesuai dengan manual iku. Berikut nilai indeks kinerja operasi kapal pengawas tahun 2022, pada tabel dibawah ini :

Tabel 23. Nilai Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas Tahun 2022

No	Speedboat Pengawas	Kapal Perikanan yang Diperiksa (25%)			Coverage Area Pengawasan (25%)			Capaian Hari Operasi (25%)			Jumlah Tangkapan Illegal Fishing (15%)			Jumlah Penyitaan Alkap Terlarang (10%)			Total Nilai Indeks	Indeks Kinerja
		TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV				
		Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai		
1	Dolphin 04	60	72	25.00	0.0249	0.0324	25.00	30	36	25.00	0	0	15.00	0	0	10.00	100	90.47
2	Napoleon 06	60	165	25.00	0.0249	0.0311	25.00	30	35	25.00	0	0	15.00	0	0	10.00	100	
3	Napoleon 14	60	66	25.00	0.0249	0.0282	25.00	30	35	25.00	0	0	15.00	0	0	10.00	100.00	
4	Napoleon 52	60	68	25.00	0.0249	0.0460	25.00	30	37	25.00	0	0	15.00	0	0	10.00	100	
5	Sea Rider/RIB	60	73	25.00	0.0249	0.0440	25.00	30	35	25.00	0	0	15.00	0	0	10.00	100	
6	Dolphin 022	60	0	0.00	0.0249	0	0.00	30	0	0.00	0	0	15.00	0	0	10.00	25	
7	Rubber Boat	60	57	23.75	0.0249	0.0299	25.00	30	36	25.00	0	0	15.00	0	0	10.00	98.75	
8	Hiu Biru	60	63	25.00	0.0249	0.0413	25.00	30	35	25.00	0	0	15.00	0	0	10.00	100	

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 1 (satu) *speedboat* yaitu Dolphin 022 yang tidak beroperasi pada tahun 2022. *Speedboat* Dholpin 022 tidak beroperasi dikarenakan mengalami kerusakan pada mesin utama. Kendala ini menjadikan target yang ditetapkan pada awal tahun tidak dapat tercapai pada triwulan sebelumnya. Upaya Pangkalan PSDKP Jakarta untuk menindaklanjuti kendala tersebut adalah berkoordinasi dengan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Koordinasi menghasilkan perlu adanya revisi target hari operasi yang semula 45 hari menjadi 30 hari. Revisi tersebut bertujuan untuk mengatasi capaian kinerja yang kurang maksimal.

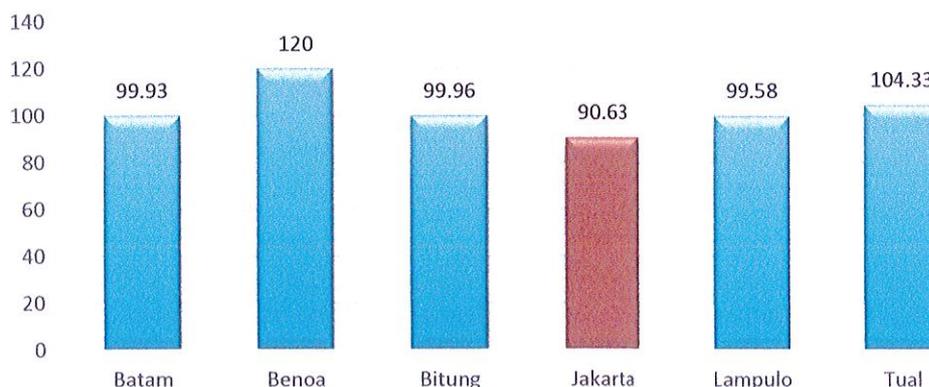
IKU indeks kinerja *speedboat* merupakan IKU baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, IKU yang terkait perhitungan kinerja kapal pengawas adalah Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau *speedboat* lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%).

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, kegiatan indeks operasi *speedboat* belum ada, sehingga diperlukan adanya reuiu Renstra 2020-2024 untuk mendukung kegiatan ini. Pada renstra IKU yang ditetapkan adalah Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau *speedboat* lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%). IKU tersebut merupakan nilai dari perbandingan frekuensi operasi *Speedboat* Pengawas, periode operasi *Speedboat*

Pengawas, jangkauan pemantauan melalui radar, kecepatan dinas, lama waktu pengawasan, faktor koreksi aktual Speedboat dengan Luas area WPPNRI. Reviu Renstra 2020-2024 akan dilaksanakan pada 2023 untuk menunjukkan IKU sebelumnya sudah tidak relevan dengan perjanjian kinerja tahun 2022.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung IKU Indeks Kinerja *Speedboat* Pengawas sebesar Rp 1.205.707.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.192.572.503,- (98,91%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 106% dan realisasi anggaran sebesar 98,91% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Bena, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas” dengan unit kerja lain :



Grafik 9. Perbandingan IKU 5 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta lebih rendah dibandingkan 5 (lima) UPT lainnya. Hal ini dikarenakan terdapat 1 (satu) unit *Speedboat* Pengawas yang tidak beroperasi selama tahun 2022 yaitu Sp. Dholpin 022 sehingga mempengaruhi capaian IKU ini.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya rapat monitoring dan evaluasi tahun 2022 yang terkait penyusunan rencana operasi kapal dan *speedboat* tahun 2022 yang diikuti seluruh Satker pusat dan UPT lingkup Ditjen PSKDP.

IKU 6 “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP”

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang

digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel. Logistik kapal terdiri dari Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas. Logistik Personel terdiri dari bahan makanan, air tawar, dan alat-alat pelayanan (ATK, bahan komputer, komaliwan, peta dan atau buku jurnal deck & mesin).

Pada tahun 2022, kegiatan pemenuhan logistik armada kapal pengawas telah terlaksana dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan BBM setiap bulan yang berasal dari berita acara BBM akhir bulan;
2. Pemenuhan kebutuhan pelumas setiap triwulan yang berasal dari Surat Permintaan Kebutuhan BBM dari Kapal Ke Kantor dan SPJ Pembelian/BAST;
3. Pemenuhan kebutuhan bahan makan setiap bulan yang berasal Surat Pengantar Kebutuhan Bahan Makanan/Natura dari Kapal Ke Kantor beserta SPJ Pembelian;
4. Pemenuhan kebutuhan air tawar setiap bulan yang berasal dari Surat Pengantar Kebutuhan Air Tawar dari Kapal Ke Kantor beserta SPJ Pembelian;
5. Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan setiap triwulan yang berasal dari Surat Pengantar Kebutuhan ATK, CS, Jurnal Deck/Mesin, Peta Laut, Buku Pasang Surut dan alat alat layanan lainnya.

Indikator logistik diatas telah terpenuhi selama tahun 2022 sehingga realisasi yang dicapai Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 90% yaitu sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 90%. Capaian IKU "Indeks Kebutuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP" diperoleh sebesar 100%. Kesesuaian realisasi dengan target yang telah ditentukan merupakan suatu keberhasilan yang dicapai. Keberhasilan kegiatan ini dikarenakan adanya pegawai yang kompeten dalam pelaksanaan kebutuhan logistik armada pengawasan SDKP dan adanya komunikasi yang baik antara awak kapal pengawas dengan Subkoordinator Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Jakarta.

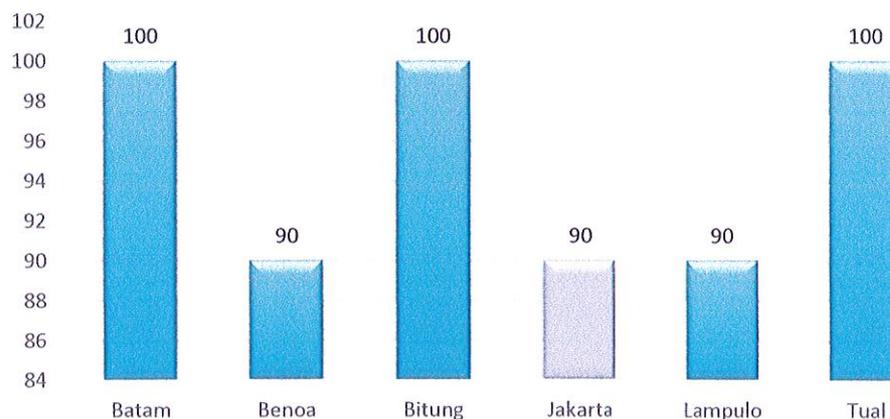
IKU indeks kinerja pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP merupakan IKU baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, kegiatan Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP belum ada, sehingga diperlukan adanya reviu Renstra 2020-

2024 untuk mendukung kegiatan ini. Pada renstra IKU ini belum ada karena kegiatan baru dimunculkan pada tahun 2022 dan termasuk IKU baru. Reviu Renstra 2020-2024 akan dilaksanakan pada 2023 untuk menunjukkan perlu adanya penambahan IKU pada Renstra 2020-2024 agar relevan dengan perjanjian kinerja tahun 2022.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung IKU Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP sebesar Rp 6.083.125.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.795.801.001,- (99,89%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,89% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Bena, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP” dengan unit kerja lain :



Grafik 10. Perbandingan IKU 6 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan 2 (dua) UPT lainnya. Akan tetapi capaian Pangkalan PSDKP Jakarta lebih rendah dari 3 (tiga) UPT lain yaitu Pangkalan PSDKP Batam, Bitung dan Tual. Hal ini dikarenakan Pangkalan PSDKP Jakarta menggunakan metode perhitungan yang diberikan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Perhitungan yang digunakan memiliki bobot maksimal 90% meskipun seluruh komponen telah tercapai.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya koordinasi yang baik dengan Direktorat Pemantaun dan Operasi Armada sehingga

IKU ini berjalan sesuai dengan target yang ditentukan.

3.2.5 Sasaran Kegiatan 5, Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP

Dalam rangka pencapaian SK "Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP", Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasi IKU, sebagai berikut:

IKU 7 "Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP (%)"

Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yaitu pembangunan kapal pengawas kelas IV (*speedboat* hiu biru 03). Pekerjaan telah 100% selesai dan sesuai sehingga Pangkalan PSDKP Jakarta telah menerima hasil pekerjaan tersebut yang telah dituangkan pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP). Berita Acara Serah Terima (BAST) No. 052/PPK-Lan.3/I/2022 tanggal 19 Januari sebagai tanda bahwa pihak kedua yaitu Ahmad Dani Virsal selaku Direktur PT. Dok dan Perkapalan Air Kantung telah menyerahkan barang hasil pengadaan kepada pihak kesatu yaitu Rahman Hakim Purnama, S.Pi, M.Si selaku PPK Pangkalan PSDKP Jakarta. Selesaiannya pembangunan *speedboat* Hiu Biru 03 menunjukkan Pangkalan PSDKP Jakarta telah memenuhi target yang ditentukan yaitu 100%. Capaian yang diperoleh pada kegiatan ini adalah 100%. Pemenuhan target tersebut menunjukkan Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil melaksanakan kegiatan dengan baik. Keberhasilan tersebut didukung dengan adanya koordinasi yang ketat secara berkala terhadap pihak kedua sehingga pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Berikut rekapitulasi capaian IKU "Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP" pada tabel halaman berikut :

Table 24. IKU Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Periode 2021-2022

IKU	2020			2021			2022			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP (%)	-	-	-	60,16	97,86	120	100	100	100	-

Pada tabel diatas menunjukkan tahun 2021 memiliki IKU “Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP (%)” dengan target 60,16. Realisasi kegiatan pada tahun 2021 sebesar 97,86 dengan capaian lebih besar dari 120%. Pada tahun 2020 tidak ada pembangunan sarana dan prasarana, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini.

Pada tahun 2022, kegiatan ini dilanjutkan dengan target penyelesaian sebesar 100%. Perbandingan dengan tahun 2022, kegiatan pembangunan sarana prasarana pengawasan SDKP merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya yaitu pembangunan speedboat HIU Biru 03 yang belum selesai pada tahun 2021 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana belum ada, sehingga diperlukan adanya reuiu Renstra 2020-2024 untuk mendukung kegiatan ini. Pada renstra IKU ini belum ada karena rencana pembangunan *speedboat* belum direncanakan pada tahun 2020. Rencana pembangunan terjadi karena adanya anggaran dan kebijakan yang mendukung. Reuiu Renstra 2020-2024 akan dilaksanakan pada 2023 untuk menunjukan perlu adanya penambahan IKU pad Renstra 2020-2024 agar relevan dengan perjanjian kinerja tahun 2022.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 3.834.985.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.834.984.406,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP (%)” pada tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja setingkat lainnya, dikarenakan IKU ini hanya ada pada Pangkalan PSDKP Jakarta. IKU

“Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP (%)” tidak terdapat pada Pangkalan Batam, Bena, Bitung, Lampulo, dan Tual.

IKU 8 “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) adalah jumlah Sarana Pengawasan SDKP yang selesai dirawat dibandingkan dengan target kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh UPT Pangkalan PSDKP Jakarta. Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 8 (delapan) unit *Speedboat*.

Pada tahun 2022, kegiatan perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP telah terlaksana dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas yang dilaksanakan setiap bulan yang dibuktikan dengan Laporan perawatan rutin bulanan;
2. Perawatan Prediktif Kapal Pengawas yang dilaksanakan setiap tahun yang dibuktikan dengan Pelaksanaan pekerjaan di bulan Februari sd Juni 2022, Dokumen Kontrak GO dan Suku cadang;
3. Perawatan Darurat Kapal Pengawas yang dilaksanakan setiap bulan yang dibuktikan dengan BA Kerusakan dan Laporan Perbaikan;
4. Perawatan Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat yang dilaksanakan setiap bulan yang dibuktikan dengan Laporan perawatan rutin bulanan;
5. Perawatan Prediktif Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat yang dilaksanakan setiap kapal yang melakukan docking yaitu Speedboat Napoleon 006 yang dibuktikan dengan Laporan Pertanggungjawaban docking Speedboat Napoleon006 dan RIB;
6. Perawatan Darurat Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat yang dilaksanakan setiap bulan yang dibuktikan dengan Surat Permohonan dan Laporan Perbaikan.

Penyelesaian perawatan telah terlaksana selama tahun 2022 sehingga realisasi yang dicapai Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 100% yaitu sesuai dengan target yang telah ditentukan. Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” diperoleh sebesar 100%. Kesesuaian realisasi dengan target yang telah ditentukan merupakan suatu keberhasilan yang dicapai.

Keberhasilan kegiatan ini dikarenakan adanya pegawai yang kompeten dalam pelaksanaan perawatan sarana pengawasan dan adanya komunikasi yang baik antara awak kapal pengawas dan *speedboat* dengan Subkoordinator Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Jakarta. Berikut Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta periode 2021-2022:

Tabel 25. Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan periode 2021-2022

IKU	2020			2021			2022			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100

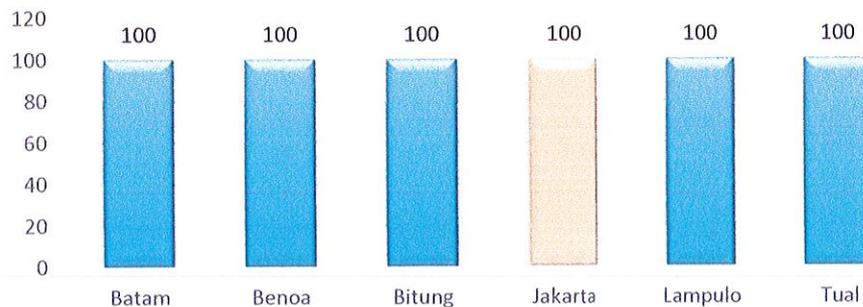
Pada tahun 2020 tidak ada pembangunan sarana dan prasarana, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini. Pada tahun 2021, sarana pengawasan yaitu kapal pengawas dan *speedboat* telah dilaksanakan perawatan. Realisasi kegiatan tersebut sebesar 100% dengan capaian 100%. Tabel diatas menunjukkan konsistensi nilai pada kegiatan perawatan tahun 2021-2022. Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan kinerjanya pada kegiatan ini.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 100% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dengan konsistensi nilai 100% maka kemungkinan besar Pangkalan PSDKP Jakarta dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan kinerja seperti periode tahun 2021-2022 sehingga kegiatan perawatan sarana pengawasan dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 2.767.669.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.765.841.344,- (99,93%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,93% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU "Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)" pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Bena, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU "Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)"

dengan unit kerja lain :



Grafik 11. Perbandingan IKU 8 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan dari UPT lainnya. Hal ini dikarenakan setiap UPT melaksanakan kegiatan armada yang dirawat sesuai dengan target yang diberikan yaitu sebesar 100%.

3.2.6 Sasaran Kegiatan 6, Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif

Dalam rangka pencapaian SK "Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif", Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasi IKU, sebagai berikut :

IKU 9 "Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)"

Persentase Efektivitas pengenaan sanksi administratif merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan. Pada PERMEN-KP nomor 31 pasal 7 dijelaskan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan terdiri atas :

1. Peringatan/Teguran tertulis
2. Paksaan Pemerintah
3. Denda Administratif
4. Pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
5. Pencabutan Perizinan Berusaha.

Pengukuran persentase efektivitas pengenaan sanksi administratif dilakukan pada tahun 2022 sebanyak 32 perusahaan. Berikut rekapitulasi sanksi administratif selama tahun 2022:

Tabel 26. Rekapitulasi sanksi administratif selama tahun 2022

No	Jenis Sanksi Administratif	Jumlah
1	Denda Administratif	5
2	Paksaan Pemerintah	4
3	Peringatan/Teguran Tertulis	23
Total		32

Berdasarkan data diatas, Pangkalan PSDKP Jakarta telah menindaklanjuti 32 kegiatan sanksi administratif yaitu diantaranya denda administratif, paksaan pemerintah, dan peringatan/teguran tertulis. Denda administratif dilakukan kepada 5 kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan dokumen perizinan. Denda telah dibayarkan oleh pemilik kapal dengan total jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.508.032.960,-. Selain itu terdapat 4 perusahaan yang menerima surat paksaan pemerintah dan 23 perusahaan mendapatkan surat peringatan/teguran tertulis. Keseluruhan sanksi administratif telah ditindaklanjuti sehingga IKU ini terealisasi sebesar 100%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan yaitu 100%, sehingga capaian pada IKU ini juga sebesar 100%. Keberhasilan kegiatan ini dikarenakan adanya tim khusus anggota yang menangani pelanggaran kapal dan adanya bendahara penerimaan yang dicantumkan pada SK Bendahara.

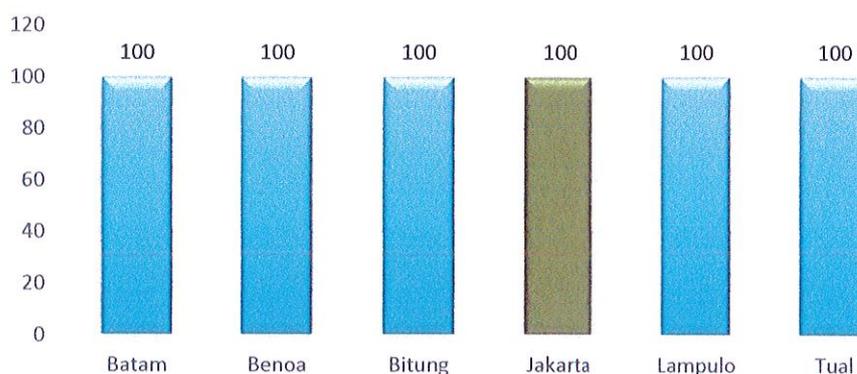
IKU Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan IKU baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta belum ada, sehingga diperlukan adanya reuiu Renstra 2020-2024 untuk mendukung kegiatan ini. Pada renstra IKU ini belum ada karena kegiatan baru dimunculkan pada tahun 2022 dan termasuk IKU baru. Reuiu Renstra 2020-2024 akan dilaksanakan pada 2023 untuk menunjukkan perlu adanya penambahan IKU pad Renstra 2020-2024 agar relevan dengan perjanjian kinerja tahun 2022.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 50.707.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 50.657.927,- (99,9%). Berdasarkan analisis

capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,9% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Persentase Efektivitas penerapan sanksi administratif lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Persentase Efektivitas penerapan sanksi administratif lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” dengan unit kerja lain :



Grafik 12. Perbandingan IKU 9 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan dari UPT lainnya. Hal ini dikarenakan setiap UPT telah menindaklanjuti seluruh kasus terkait sanksi administratif selama tahun 2022.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya Bimtek Pengelolaan PNBK di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 19 - 21 april 2022 di Hotel Ciputra Cibubur JL. Alternatif Cibubur KM.4, Jatikarya, Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat.

IKU 10 “Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Persentase efektivitas koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT DJPSDKP dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan Forum Koordinasi masing – masing daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.18/MEN/2011 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak

Pidana di Bidang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan efektivitas koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan telah dilaksanakan berupa rapat koordinasi penanganan tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan. Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022 di Grand Dafam Ancol Jakarta. Rapat dihadiri sebanyak 35 peserta yang diantaranya terdapat pegawai dari instansi eselon I PSDKP, BAKAMLA RI, Dit. Polairud, Pengadilan tinggi negeri Jakarta Utara, Lantamal III, dan Penagwas Perikanan. Peserta yang mengikuti kegiatan telah mengisi kuisisioner sehingga realisasi kegiatan ini adalah 100% dengan target yang telah ditentukan sebesar 100%. Capaian tahun 2022 untuk IKU "Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta" adalah 100%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil menyelesaikan kegiatan yang mendukung IKU ini. Keberhasilan kegiatan tidak lepas dari peran peserta dan narasumber dalam kegiatan rapat koordinasi yang bersinergi.

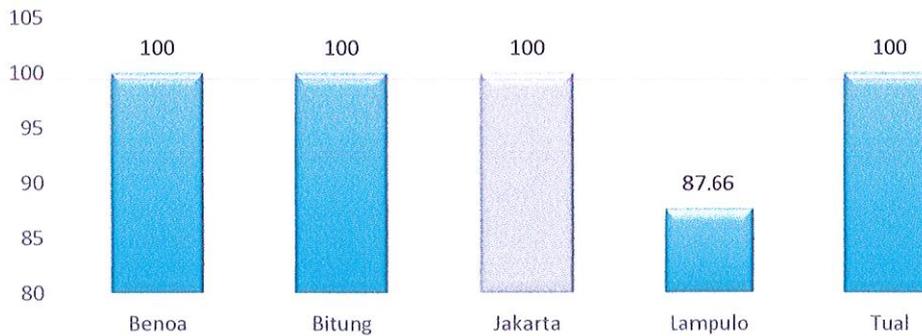
IKU "Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta" merupakan IKU baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, kegiatan Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta belum ada, sehingga diperlukan adanya reuiu Renstra 2020-2024 untuk mendukung kegiatan ini. Pada renstra IKU ini belum ada karena kegiatan baru dimunculkan pada tahun 2022 dan termasuk IKU baru. Reuiu Renstra 2020-2024 akan dilaksanakan pada 2023 untuk menunjukkan perlu adanya penambahan IKU pad Renstra 2020-2024 agar relevan dengan perjanjian kinerja tahun 2022.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 36.414.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 36.414.000,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU "Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)" pada tahun 2022,

jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Bena, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” dengan unit kerja lain :



Grafik 13. Perbandingan IKU 10 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta sama dengan 3 (tiga) UPT lainnya. Adapun 1 (satu) UPT tidak memiliki capaian karena Pangkalan PSDKP Batam tidak diberikan anggaran untuk melaksanakan Koordinasi Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022.

3.2.7 Sasaran Kegiatan 7, Tata Kelola Pemerintah yang Baik lingkup Ditjen PSDKP

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. Dalam rangka pencapaian SK “Tata Kelola Pemerintah yang Baik lingkup Ditjen PSDKP”, berikut beberapa IKU yang menunjang SK 7 :

IKU 11 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)”

Indeks kepuasan masyarakat didapatkan dari nilai SKM yang dilaksanakan setiap triwulan sekali. Nilai SKM pada triwulan IV tahun 2022 merupakan nilai IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)” yaitu sebesar 89,82 dengan capaian sebesar

112%. Berikut nilai IKM pengguna layanan SLO periode tahun 2021-2022 :

Table 27. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO Periode 2021-2022

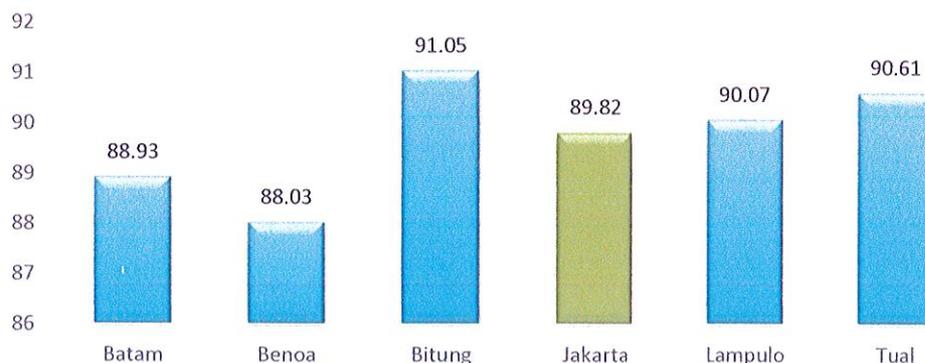
IKU	2020			2021			2022			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	80	88,15	110	80	90,24	113	80	89,9	112	80

Pada tahun 2020 terdapat realisasi sebesar 88,15 dengan capaian sebesar 110% sedangkan pada tahun 2021, kegiatan indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO terealisasi sebesar 90,24 dengan capaian 113%. Jika dibandingkan dengan tahun ini maka terdapat penurunan nilai IKM pengguna layanan SLO lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta. Penurunan terjadi sebesar 0,34 pada tahun 2022, akan tetapi penurunan nilai tersebut tidak merubah nilai mutu pelayanan pada perhitungan nilai survey. Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan nilai mutu pelayanan "A" dengan kinerja unit pelayanan "**Sangat Baik**" sesuai dengan laporan SKM Pelayanan SLO periode triwulan IV tahun 2022.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 80 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang tetap melebihi dari nilai target tahun 2021-2022 maka Pangkalan PSDKP Jakarta optimis untuk mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2024. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan kinerja seperti periode tahun 2021-2022 sehingga kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 11.900.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 11.163.000,- (94%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 112% dan realisasi anggaran sebesar 94% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU "Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta" pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU "Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta" dengan unit kerja lain :



Grafik 14. Perbandingan IKU 11 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan 3 (tiga) UPT lainnya yaitu Pangkalan PSDKP Bitung, Tual dan Lampulo. Hal ini dikarenakan bervariasinya jawaban dari responden disetiap UPT. Akan tetapi, nilai interval 88,31-100 termasuk kedalam kategori mutu pelayanan “A” dengan kinerja unit pelayanan “**Sangat baik**”

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya Bimbingan Teknis Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 18 - 19 Agustus 2022 di Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bimtek tersebut bertujuan untuk meningkatkan integritas pegawai dalam melaksanakan budaya pelayanan prima.

IKU 12 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)”

Indeks kepuasan masyarakat didapatkan dari nilai SKM yang dilaksanakan setiap triwulan sekali. Nilai SKM pada triwulan IV tahun 2022 merupakan nilai IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)” yaitu sebesar 92,69 dengan capaian sebesar 116%. Berikut nilai IKM pengguna layanan SLO periode tahun 2021-2022 :

Table 28. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI

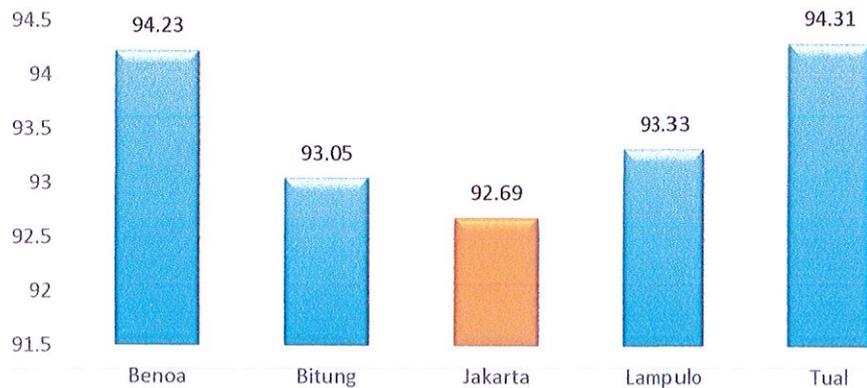
IKU	2020			2021			2022			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	-	-	-	80	91,55	114	80	90,95	114	80

Pada tahun 2020 tidak ada pembangunan sarana dan prasarana, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini sedangkan pada tahun 2021, kegiatan indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO terealisasi sebesar 90,24 dengan capaian 113%. Jika dibandingkan dengan tahun ini maka terdapat peningkatan terjadi sebesar 0,6 pada tahun 2022, akan tetapi peningkatan nilai tersebut tidak merubah nilai mutu pelayanan pada perhitungan nilai survey. Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan nilai mutu pelayanan "A" dengan kinerja unit pelayanan "Sangat Baik" sesuai dengan laporan SKM Pelayanan SLO periode triwulan IV tahun 2022.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 80 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang tetap melebihi dari nilai target tahun 2021-2022 maka Pangkalan PSDKP Jakarta optimis untuk mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2024. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan kinerja seperti periode tahun 2021-2022 sehingga kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 11.900.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 11.163.000,- (94%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 112% dan realisasi anggaran sebesar 94% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU "Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)" pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU "Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)" dengan unit kerja lain :



Grafik 15. Perbandingan IKU 12 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki nilai terendah dibandingkan dengan 4 (empat) UPT lainnya yaitu Pangkalan PSDKP Bitung, Tual, Lampulo dan Benoa. Adapun 1 UPT yaitu Pangkalan PSDKP Batam tidak memiliki nilai dikarenakan tidak ada kegiatan penerbitan LVHPI. Meskipun Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki nilai terendah namun nilai tersebut masih termasuk ke dalam kategori mutu pelayanan “A” dengan kinerja unit pelayanan “**Sangat baik**”.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya Bimbingan Teknis Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 18 - 19 Agustus 2022 di Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan.

IKU 13 “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)”

Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan yang mendukung Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sejak pencanangan pertama pada Oktober 2017. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berkomitmen untuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komponen penilaian dalam Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2022, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melengkapi seluruh komponen penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang hasil penilaian tersebut merupakan realisasi pada IKU “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta”. Hasil penilaian dituangkan pada Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI). Nilai pada LKE Pangkalan PSDKP Jakarta

sebesar 85,86 dengan capaian sebesar 114%. Nilai tersebut sudah memenuhi target yang telah ditentukan yaitu 75 sehingga Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari tahun sebelumnya. Berikut rekapitulasi nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta periode 2021-2022 :

Tabel 29. Rekapitulasi nilai WBK periode tahun 2021-2022

IKU	2020			2021			2022			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai) ²³	75	84,99	113	75	79,91	111	75	85,86	114	75

Data diatas merupakan nilai WBK periode tahun 2020-2022, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai tahun 2022 mengalami peningkatan. Peningkatan nilai tersebut dikarenakan adanya perbaikan pada setiap komponen penilaian pada tahun ini. Berikut perbandingan nilai komponen periode tahun 2021-2022:

Tabel 30. Perbandingan nilai komponen WBK periode tahun 2021-2022

NO	KOMPONEN	REALISASI	
		2021	2022
A	I. PENGUNGKIT		
	Manajemen Perubahan	63,63	81,14
	Penataan Tata Laksana	76,14	69,48
	Penataan Sistem Manajemen SDM	69,30	78,88
	Penguatan Akuntabilitas	69,10	96,88
	Penguatan Pengawasan	61,73	80,05
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	69,30	83,40
	II. REFORM		
	Manajemen Perubahan	-	91,75
	Penataan Tata Laksana	-	66,71
	Penataan Sistem Manajemen SDM	-	70,00
	Penguatan Akuntabilitas	-	70,00
	Penguatan Pengawasan	-	91,67
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	62,75
B	HASIL		
	Pemerintah Bersih dan Bebas KKN	99,05	100
	Kualitas Pelayanan Publik	98,25	89,75

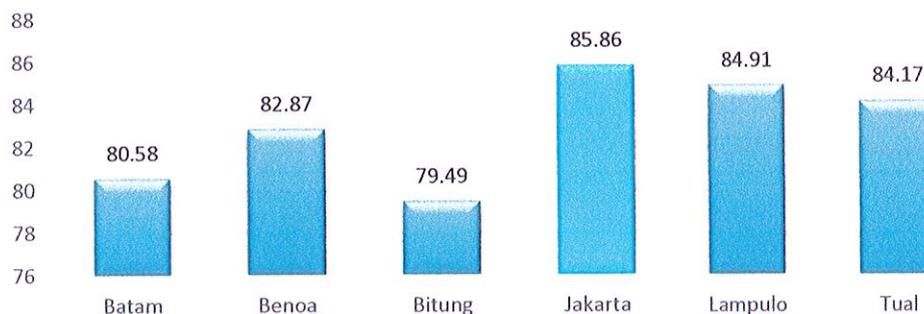
Pada tahun 2022, terdapat LKE baru berdasarkan keputusan Itjen nomer 22 tahun 2022 tentang juknis pengawasan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada unit kerja di lingkup KKP yaitu terdapat penambahan komponen yaitu indikator reform. Indikator reform

ditambahkan pada penilaian pengungkit sehingga perbandingan nilai pada komponen A berbeda dengan tahun 2021. Perbedaan tersebut menjadikan nilai WBK tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 75 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang tetap melebihi dari nilai target, maka Pangkalan PSDKP Jakarta optimis untuk mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2024. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan predikat WBK yang telah diperoleh sejak tahun 2017.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 22.980.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 22.243.000,- (97%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 114% dan realisasi anggaran sebesar 97% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta” dengan unit kerja lain :



Grafik 16. Perbandingan IKU 13 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki nilai tertinggi dibandingkan seluruh UPT Pangkalan lainnya. Nilai tersebut diperoleh dari kerjasama Tim Zona Integritas yang baik dan adanya keterlibatan pimpinan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.

IKU 14 “Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta”

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

Pengukuran kegiatan ini dilakukan setiap semester dan berdasarkan IK yang digunakan Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu : (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) kinerja; dan (4)

Disiplin. Pengukuran kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2022. beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian IK ini antara lain:

- a. Melakukan update data SDMA yang terdapat dalam aplikasi Simpeg meliputi data pendidikan, pelatihan dll.
- b. Monitoring dan evaluasi secara berkala tingkat kehadiran pegawai PSDKP melalui *finger print online*.
- c. Monitoring dan Evaluasi pengisian capaian kinerja Output individu pada Aplikasi E-SKP
- d. Pembinaan pegawai pada Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta.

Tabel 31. Perbandingan Indeks Profesional ASN Periode 2021-2022

IKU	2020			2021			2022			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta	72	73,32	102	73	79,69	114	77	80,31	104	72

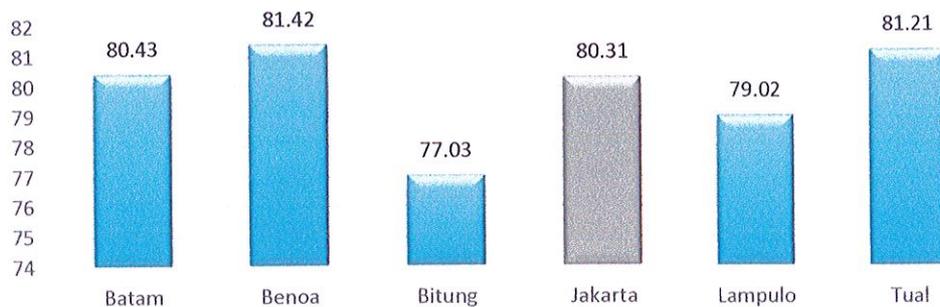
Berdasarkan data diatas menunjukkan nilai pada tahun 2022 secara realisasi meningkat dan mengalami penurunan secara capaian, hal tersebut terjadi karena target pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Peningkatan target setiap tahun dari tahun 2020 merupakan sebuah tindakan yang positif untuk meningkatkan kompetensi ASN sehingga target pada tahun ini meningkat dari 73 menjadi 77. Realisasi IKU pada tahun 2022 sebesar 80,31 dengan capaian sebesar 104%.

Pada tahun 2021, kegiatan ini telah terealisasi sebesar 79,69 dengan capaian 114%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, IKU ini mengalami peningkatan sehingga Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mempertahankan kinerja dalam meningkatkan indeks profesional ASN.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 72 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang tetap melebihi dari nilai target, maka Pangkalan PSDKP Jakarta optimis untuk mencapai target IKU Indeks Profesional ASN yang telah ditentukan pada tahun 2024. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan capaian yang telah diperoleh sehingga kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 54.360.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 54.187.300,- (99,7%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 112% dan realisasi anggaran sebesar 99,7% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta” dengan unit kerja lain :



Grafik 17. Perbandingan IKU 14 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta lebih rendah dibandingkan 3 (tiga) UPT lainnya yaitu Pangkalan PSDKP Batam, Benoa, dan Tual. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat pegawai di lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang memiliki kompetensi rendah dan perlu dilakukan evaluasi terhadap pegawai tersebut.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta lebih tinggi dari 2 (dua) UPT lain yaitu Pangkalan PSDKP Lampulo dan Bitung. Hal ini dikarenakan adanya peran

aktif tim kepegawaian dalam memberikan informasi bimtek dan diklat di media sosial Pangkalan PSDKP Jakarta.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya Pelatihan Teknis Pengelolaan Arsip dan Persuratan Tingkat Dasar Akt I dan II secara online tanggal 26 - 29 September 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 26 - 29 September 2022 daring melalui Zoom meeting.

IKU 15 “Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)”

Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebetulnya verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek:

- Aspek kepatuhan : dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja
- Aspek kesesuaian : dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan
- Aspek ketercapaian : dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku)

Tabel 32. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta Periode 2021-2022

IKU	2020			2021			2022			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	90	92,36	103	90	98,22	109	90	96,78	108	90

Penilaian rekonsiliasi kinerja lingkup DJPSDKP tahun 2022 dilaksanakan pada November 2022 melalui daring dan luring. Hasil rekonsiliasi kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 96,78 dengan capaian 108%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pangkalan PSDKP Jakarta sebagian besar telah memenuhi 3 aspek pada lembar kerja rekonsiliasi kinerja.

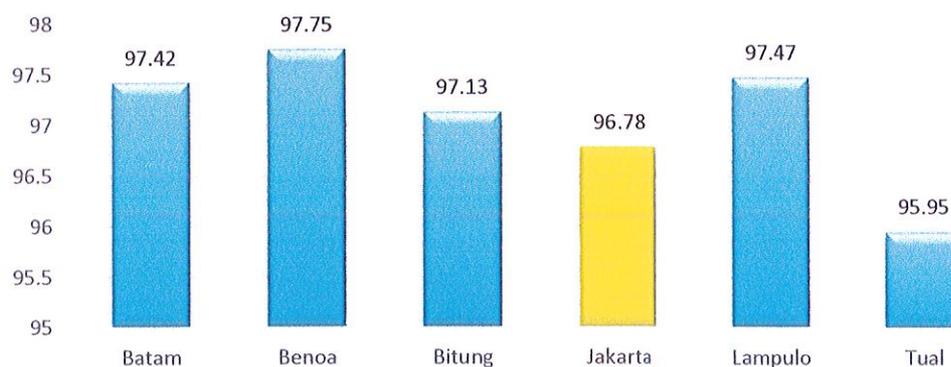
Pada tahun 2020, IKU ini terealisasi sebesar 92,36 dengan capaian sebesar 103% sedangkan pada tahun 2021, IKU ini terealisasi sebesar 98,22% dengan capaian sebesar

109%, jika dibandingkan dengan tahun ini maka "IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)" telah penurunan. Penurunan terjadi dikarenakan terdapat aspek yang menurun dari tahun sebelumnya yaitu aspek ketercapaian. Aspek ketercapaian merupakan nilai yang didapatkan dari NPSS pada aplikasi Kinerjaku. Tahun ini nilai NPSS mengalami penurunan pada triwulan III, sehingga nilai tersebut mempengaruhi nilai rekonsiliasi pada tahun ini.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, target Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 90. Apabila dibandingkan dengan dari tahun 2020 hingga 2022 maka Pangkalan PSDKP Jakarta berpotensi untuk mencapai target pada tahun 2024.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 6.732.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.730.000,- (99,9%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 108% dan realisasi anggaran sebesar 99,9% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU "Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)" pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU "Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)" dengan unit kerja lain :



Grafik 18. Perbandingan IKU 15 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta lebih rendah dibandingkan 4 (empat) UPT lainnya yaitu Pangkalan PSDKP Batam, Benoa,

Bitung dan Lampulo. Hal ini dikarenakan nilai NPSS Pangkalan PSDKP Jakarta lebih rendah dari keempat UPT tersebut sehingga total nilai pada aspek ketercapaian menurun dan mempengaruhi Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya diklat sebagai berikut :

Tabel 33. Rekapitulasi Kegiatan Bimtek dan Diklat terkait Nilai Rekonsiliasi Kinerja

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan
1	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2022 sekaligus Finalisasi Dokumen Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2022	25 - 28 Januari 2022	Hotel Aryaduta Menteng Jl. KKO Usman dan Harun 44 - 48 Jakarta Pusat
2	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2022 sekaligus Finalisasi Dokumen Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2022	8-11 Maret 2022	Grand Mercure Yogyakarta, Jl. Laksda Adisucipto no.80, Demangan Baru, Caturtunggal, Sleman, Kota Yogyakarta

IKU 16 “Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)”

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan.

Pada tahun 2022, Pangkalan PSDKP Jakarta telah menerapkan inovasi pelayanan publik. Inovasi yang telah diterapkan untuk mendukung pelayanan publik adalah Mas Bro (*Massage Broadcasting*). Inovasi ini juga telah diikuti sertakan dalam lomba inovasi Ditjen PSDKP Tahun 2022 pada tanggal 15 Desember 2022. Realisasi kegiatan ini sebesar 1 inovasi dengan capaian sebesar 100%. Berikut nilai IKU Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik periode 2021-2022:

Tabel 34. Nilai Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik periode 2021-2022

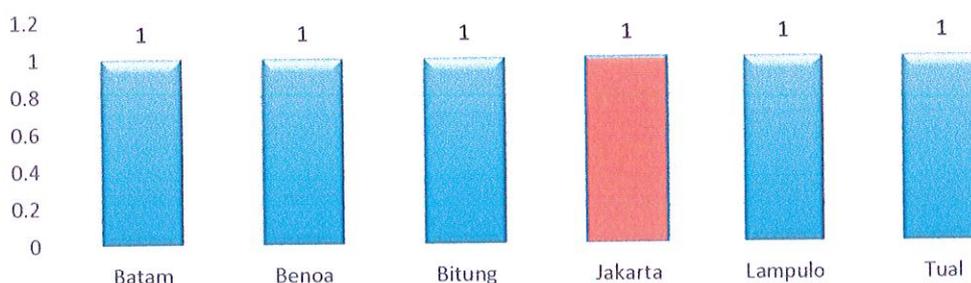
IKU	2020			2021			2022			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)"	-	-	-	1	1	100	1	1	100	-

Pada tahun 2020 tidak ada pembangunan sarana dan prasarana, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini sedangkan pada tahun 2021, Pangkalan PSDKP Jakarta telah menghasilkan 1 (satu) inovasi berupa penyederhanaan waktu pelayanan HPK/SLO melalui permohonan WA Interaktif (SIPEPI Versi 2021). Inovasi yang telah diterapkan tersebut menjadikan Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan kinerjanya dengan menghasilkan 2 (dua) inovasi pada periode 2021-2022.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024, IKU "Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik" belum ada, sehingga diperlukan adanya reviu Renstra 2020-2024 untuk mendukung kegiatan ini. Pada renstra IKU ini belum ada karena kegiatan baru dimunculkan pada tahun 2021. Reviu Renstra 2020-2024 akan dilaksanakan pada 2023 untuk menunjukkan perlu adanya penambahan IKU pada Renstra 2020-2024 agar relevan dengan perjanjian kinerja tahun 2022.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 850.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 850.000,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU "Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik" pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU "Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik" dengan unit kerja lain :



Grafik 19. Perbandingan IKU 16 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian seluruh UPT Pangkalan memiliki capaian yang sama. Setiap UPT mengupayakan agar memiliki inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja masing-masing.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya rapat internal tim inovasi yang dilaksanakan secara berkala. Rapat rutin ini dilaksanakan agar seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam penyusunan inovasi yang diterapkan pada pelayanan publik Pangkalan PSDKP Jakarta.

IKU 17 “Nilai implementasi budaya kerja (nilai)”

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Pangkalan, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.

Pada tahun 2022, Pangkalan PSKDP Jakarta telah melaksanakan kegiatan implementasi budaya kerja dengan melengkapi data dukung sesuai dengan LKE budaya kerja. Penilaian dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2022 melalui luring dan daring. Paangkalan PSKDP Jakarta mendapatkan nilai 23,01 dengan capaian sebesar 110%. Terpenuhinya target pada IKU ini membuktikan bahwa Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mengimplementasikan nilai-nilai budaya kerja dengan baik. Kegiatan ini tidak lepas dari dukungan pimpinan dalam memberikan arahan pada setiap apel pagi untuk meningkatkan integritas diri dalam menjalankan suatu pekerjaan serta tim GKM yang selalu mengingatkan untuk tetap menjaga budaya kerja yang baik. Berikut nilai implementasi budaya kerja periode 2021-2022:

Tabel 35. Nilai Unit Kerja yang Menerapkan Implementasi Budaya Kerja periode 2021-2022

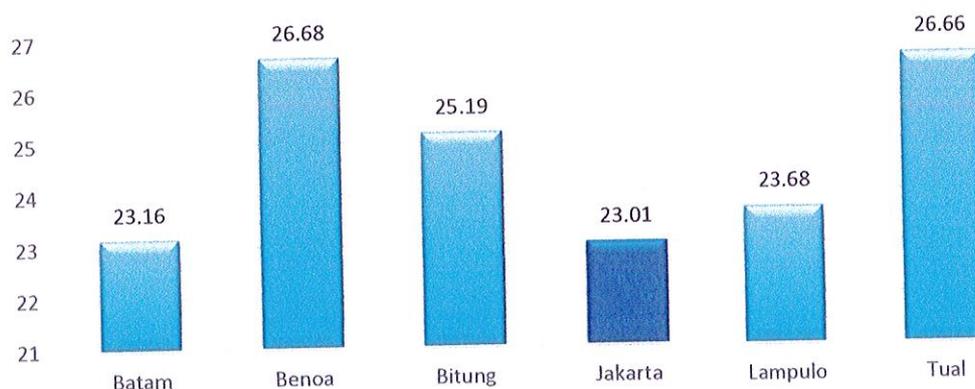
IKU	2020			2021			2022			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	%	T
Nilai implementasi budaya kerja (nilai)	-	-	-	-	-	-	21	23,01	110	-

Pada tahun 2020 tidak ada pembangunan sarana dan prasarana, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini sedangkan pada tahun 2021, IKU nilai implementasi budaya kerja belum termasuk dalam perjanjian kinerja. Kegiatan ini merupakan iku baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada rencana strategis 2020-2024, target untuk IKU "Nilai implementasi budaya kerja (nilai)" belum ada, sehingga perlu adanya reviu renstra untuk menyesuaikan dengan perjanjian kinerja yang telah revisi.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 3.000.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 110% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU "Nilai implementasi program budaya kerja" pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU "Nilai implementasi program budaya kerja" dengan unit kerja lain :



Grafik 20. Perbandingan IKU 17 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki capaian terendah. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kepedulian pegawai terhadap lingkungannya. Kepedulian pegawai terhadap lingkungan tersebut termasuk dalam komponen *Go Green* yang terdapat pada LKE Budaya kerja sehingga mempengaruhi rendahnya nilai LKE budaya kerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah kegiatan Pendampingan Implementasi 5R dan Go Green di Pangkalan Jakarta sebanyak 2 kali oleh Tim Budaya Kerja Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP KKP. Kegiatan tersebut termasuk dalam salah satu komponen 11 program Budaya Kerja Lingkup Dirjen PSDKP. Berikut rekapitulasi pendampingan yang mendukung iku ini :

Tabel 36. Rekapitulasi Kegiatan Bimtek dan Diklat terkait Implementasi Budaya Kerja

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan
1	Pendampingan Implementasi 5R dan Go Green di Pangkalan Jakarta	4 Agustus 2022	Pangkalan PSDKP Jakarta
2	Pendampingan Implementasi 5R dan Go Green di Pangkalan Jakarta	31 Agustus 2022	Pangkalan PSDKP Jakarta

IKU 18 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Kegiatan “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada bulan November 2022.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2022 berdasarkan jumlah nilai dari 5 komponen dalam Lembar Kerja Penilaian (LKE), berikut nilai hasil penilaian pengelolaan BMN Pangkalan PSDKP Jakarta:

Table 37. Lembar Kerja Penilaian Kegiatan BMN

No	Komponen	Nilai
1	Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (12,5);	12,5
2	Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25);	25
3	Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (25);	25

4	Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25);	25
5	Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5).	12,5
TOTAL		100

Berdasarkan penilaian tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta telah memenuhi sebagian besar komponen yang diminta berdasarkan Lembar Kerja Penilaian (LKE) dengan nilai 100. Capaian yang diperoleh dari target 75 adalah 120%.

Tabel 38. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN periode 2021-2022

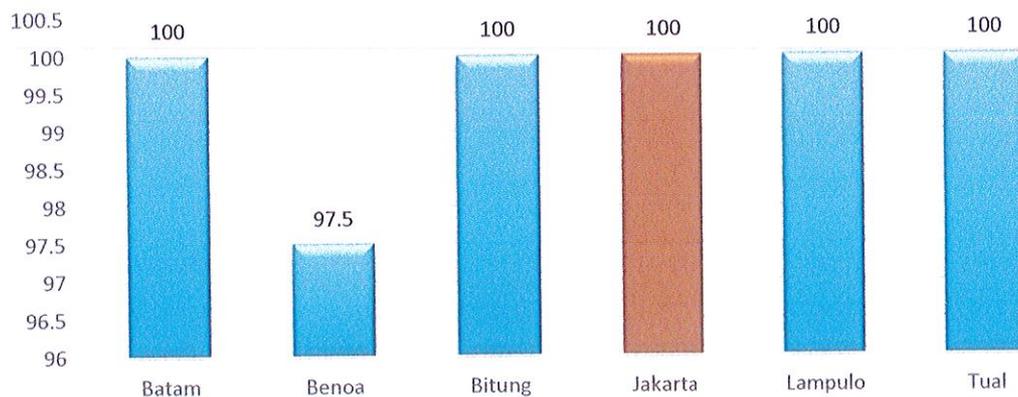
IKU	2022			2021			2022			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	-	-	-	72,5	97,5	120	75	100	120	72,5

Pada tahun 2020 tidak ada pembangunan sarana dan prasarana, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini sedangkan pada tahun 2021, kegiatan ini telah terealisasi sebesar 97,5 dengan capaian 120%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, IKU ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan terdapat pada komponen tingkat pemanfaatan rencana kebutuhan BMN. Pada tahun 2022, Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil meningkatkan tingkat pemanfaatan rencana kebutuhan BMN sehingga nilai pada komponen tersebut memenuhi nilai maksimal yang ditentukan.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 72,5 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang tetap melebihi dari nilai target dengan capaian lebih besar dari 120%, maka Pangkalan PSDKP Jakarta optimis untuk mencapai target IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang telah ditentukan pada tahun 2024. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan capaian yang telah diperoleh sehingga kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 9.900.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.900.000,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 120% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan sangat efisien.

Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” dengan unit kerja lain :



Grafik 21. Perbandingan IKU 18 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki capaian sama dengan 4 UPT lainnya yaitu Pangkalan PSKDP Batam, Bitung, Lampulo dan Tual. Hal ini dikarenakan setiap UPT memiliki tim pengelola BMN yang kompeten serta adanya keterlibatan pimpinan dalam pengelolaan BMN tersebut.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya kegiatan Diklat terkait pengelolaan BMN yang dilakukan secara berkala melalui daring/zoom. Diklat tersebut diikuti oleh tim pengelolan BMN Pangkalan PSKDP Jakarta.

IKU 19 “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Kegiatan “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada bulan November

2022. Tingkat kepatuhan PBJ lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta diukur berdasarkan jumlah nilai dari 6 (enam) komponen. Berdasarkan penilaian tersebut Pangkalan PSDKP Jakarta telah memenuhi sebagian besar komponen yang diminta berdasarkan Lembar Kerja Penilaian (LKE) dengan nilai 100. Capaian yang diperoleh dari target 75 adalah 120%, berikut nilai hasil penilaian pengadaan barang/jasa Pangkalan PSDKP Jakarta:

Table 39. Lembar Kerja Penilaian Kegiatan PBJ

No	Komponen	Bobot Penilaian
1	Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta (10%)	10%
2	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (15%)	15%
3	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE (10%)	10%
4	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (45%)	45%
5	Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%)	5%
6	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Tw I s.d. Tw III Tahun 2021 (15%)	15%
TOTAL		100%

Tabel 40. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) Periode 2021-2022

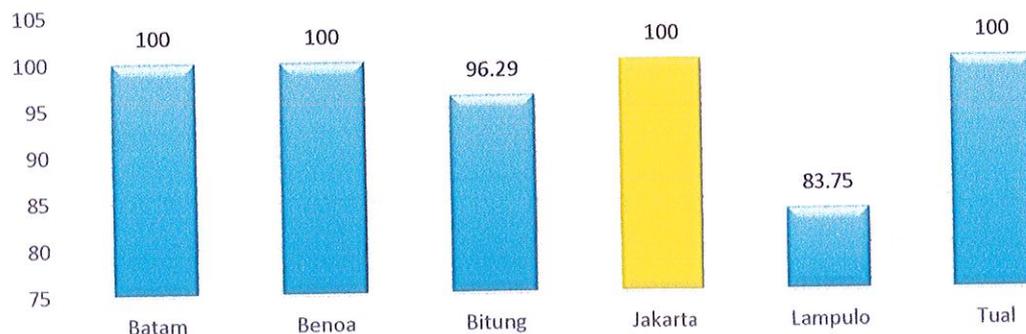
IKU	2020			2021			2022			2024
	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	-	-	-	72,5	85,19	118	75	100	120	72,5

Pada tahun 2020 tidak ada pembangunan sarana dan prasarana, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini sedangkan ada tahun 2021, kegiatan ini telah terealisasi sebesar 85,19 dengan capaian 118%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, IKU ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan terdapat pada komponen Perencanaan dan Persiapan Pengadaan dan Kesesuaian Tahap Pelaksanaan. Pada tahun 2022, Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil meningkatkan tingkat komponen yang masih rendah pada tahun 2022 sehingga nilai pada komponen tersebut memenuhi nilai maksimal yang ditentukan.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 72,5 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang tetap melebihi dari nilai target dengan capaian lebih besar dari 120%, maka Pangkalan PSDKP Jakarta optimis untuk mencapai target IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang telah ditentukan pada tahun 2024. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan capaian yang telah diperoleh sehingga kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 9.900.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.900.000,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 120% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan sangat efisien.

Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” dengan unit kerja lain :



Grafik 22. Perbandingan IKU 19 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki capaian sama dengan 3 (tiga) UPT lainnya yaitu Pangkalan PSKDP Batam, Benoa dan Tual. Hal ini dikarenakan setiap UPT memiliki tim pengadaan barang dan jasa yang kompeten serta adanya keterlibatan pimpinan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya kegiatan Diklat terkait pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada tanggal 13-16 Juni 2022 di Balai Diklat Aparatur Sipil Negara, Sukamandi, Jawa Barat.

IKU 20 “Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”

Pangkalan PSDKP Jakarta menggunakan sistem manajemen yang sama yang digunakan di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi Bitriks. Perhitungan capaian ini didasarkan atas 3 komponen yaitu: ⁽¹⁾Dokumen; ⁽²⁾Keikutsertaan ⁽³⁾Keaktifan. Realisasi IKU “Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” triwulan IV tahun 2022 sebesar 100%. Target yang ditentukan pada tahun ini adalah 86, sehingga didapatkan capaian IKU ini sebesar 116%. Berikut nilai unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar periode 2021-2022:

Tabel 41. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar periode 2020-2022

IKU	2020			2021			2022			2024
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T
Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	82	86,67	106	84	100	119	86	96,6	112	84

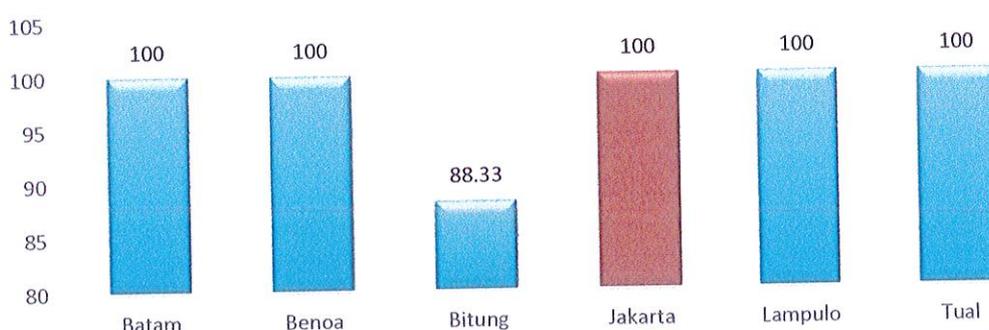
Pada tahun 2020 IKU ini terelisasi sebesar 86,67 dengan capaian sebesar 106% sedangkan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 100% pada triwulan IV tahun 2022 dengan capaian 112%. Realisasi yang konsisten pada tahun 2021-2022 menjadikan Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mempertahankan kinerja dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 72,5 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang tetap melebihi dari nilai target dengan capaian lebih besar dari 120%, maka Pangkalan PSDKP Jakarta optimis untuk mencapai target IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang telah ditentukan pada tahun 2024. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan capaian yang telah diperoleh sehingga kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 8.500.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 8.500.000,- (100%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 116% dan realisasi anggaran sebesar 100% dapat disimpulkan

penggunaan anggaran tepat sasaran dan sangat efisien.

Capaian IKU "Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)" pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU "Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)" dengan unit kerja lainnya :



Grafik 23. Perbandingan IKU 20 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki capaian sama dengan 4 (empat) UPT lainnya yaitu Pangkalan PSKDP Batam, Benoa, Lampulo dan Tual. Hal ini dikarenakan setiap UPT memiliki kesadaran akan pentingnya pengisian aplikasi Bitriks sehingga nilai pada capaian IKU ini mendapat nilai 100%.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya kegiatan Workshop SAKIP yang dilaksanakan pada tanggal 26-29 Juli 2022. Pada Workshop SAKIP tersebut terdapat kegiatan paparan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi KKP dengan judul tema "Peran dan Optimalisasi pemanfaatan aplikasi bitrix KKP".

IKU 21 "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP jakrta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan Disampaikan (%)"

Capaian kinerja IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP jakrta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

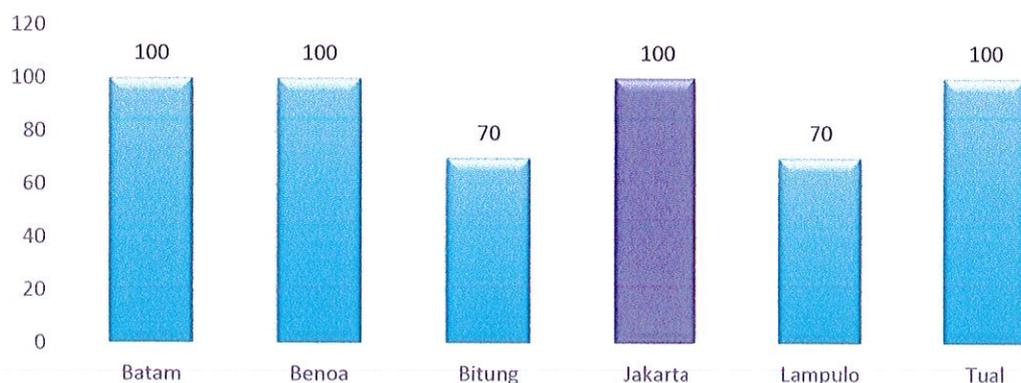
(%)” diperoleh dari jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Pangkalan PSDKP Jakarta berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2021 s.d 30 September 2022 yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Selama periode LHP tersebut, Pangkalan PSDKP Jakarta memperoleh 4 (empat) jumlah rekomendasi dari Inspektorat Jenderal. Seluruh rekomendasi tersebut telah diselesaikan dan ditindaklanjuti sehingga realisasi IKU ini sebesar 100%. Target yang ditentukan pada tahun 2022 sebesar 70%, sehingga capaian yang diperoleh Pangkalan PSDKP Jakarta lebih dari 120%. Capaian kegiatan yang tinggi ini menunjukkan Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai IKU baru pada tahun 2022. Keberhasilan ini didukung karena adanya koordinasi yang baik antara pihak Pangkalan PSDKP Jakarta, Sesditjen PSDKP dan APIP Inspektorat Jenderal.

IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan(%)” merupakan IKU baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2021.

Pada rencana strategis 2020-2024, target untuk IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan(%)” belum ada, sehingga perlu adanya reviu renstra untuk menyesuaikan dengan perjanjian kinerja yang telah revisi.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 17.210.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 17.202.500,- (99,9%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 120% dan realisasi anggaran sebesar 99,9% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” dengan unit kerja lainnya :



Grafik 24. Perbandingan IKU 21 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki capaian sama dengan 3 (tiga) UPT lainnya yaitu Pangkalan PSKDP Batam, Benoa, dan Tual. Hal ini dikarenakan setiap UPT telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal.

IKU 22 “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)”

Capaian kinerja IKU “Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Pengukuran IK Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi 8 (delapan) komponen capaian yaitu Revisi DIPA, Deviasi Hal.III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

Pada tahun 2022, realisasi IKU ini sebesar 95,13 dengan capaian sebesar 107%. Adapun rekapitulasi nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran periode tahun 2021-2022 sebagai berikut:

Tabel 42. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran periode 2020-2022

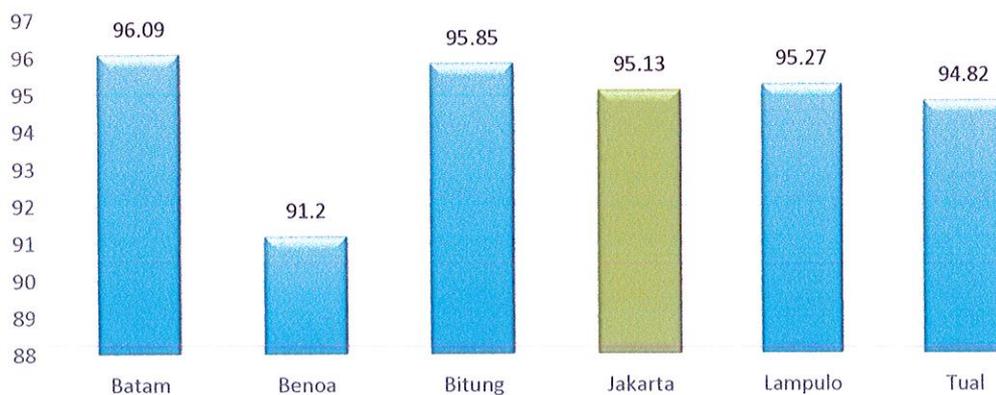
IKU	2020			Tahun 2021			Tahun 2022			2024
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	88	93,24	106	89	95,87	107	89	95,13	107	89

Pada tahun 2020, IKU ini terealisasi sebesar 93,24 dengan capaian sebesar 106% sedangkan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 95,87. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mempertahankan capaian selama periode 2021-2022 sebesar 107. Pada tahun 2021, IKU ini terealisasi sebesar 95,87 dari target yang telah ditentukan sebesar 89. Secara realisasi nilai IKU ini mengalami penurunan dikarenakan terdapat perubahan bobot nilai komponen pada aplikasi Kementerian Keuangan yaitu aplikasi OMSPAN. Jumlah komponen yang dinilai pada tahun 2021 adalah 13 komponen, sedangkan pada tahun ini menjadi 8 komponen. Perubahan jumlah komponen tersebut mempengaruhi selisih nilai pada realisasi pada tahun ini.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 89. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka Pangkalan PSDKP Jakarta berpotensi untuk mencapai target IKU “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” yang telah ditentukan pada tahun 2024. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan capaian yang telah diperoleh sehingga kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 17.210.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 17.202.500,- (99,9%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 107% dan realisasi anggaran sebesar 99,9% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Benoa, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” dengan unit kerja lain :



Grafik 25. Perbandingan IKU 22 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta lebih rendah dari capaian 3 (tiga) UPT lainnya yaitu Pangkalan PSKDP Batam, Bitung, dan Lampulo. Grafik tersebut juga menunjukkan Pangkalan PSKDP Jakarta memiliki nilai capaian lebih tinggi dari 2 (dua) UPT lainnya yaitu Pangkalan PSDKP Tual dan Benoa.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah rapat yang diadakan oleh KPPN Jakarta VI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan pada tanggal 21 Juni 2022 dengan perihal strategi optimalisasi capaian IKPA Satker triwulan II tahun 2022.

IKU 23 "Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)"

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan oleh Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta pada tahun 2022 kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id). Pengukuran kinerja IKU ini dilaksanakan pada akhir tahun 2022 dengan target yang telah ditetapkan sebesar 81%. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2022 adalah 85,54% dengan capaian sebesar 100%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai nilai target yang ditentukan. Keberhasilan pada iku ini tidak lepas dari peran aktif dari koordinator tingkat Seditjen yang secara berkala mengingatkan progress nilai kinerja anggaran di aplikasi grup *Whatsapp*.

Tabel 43. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

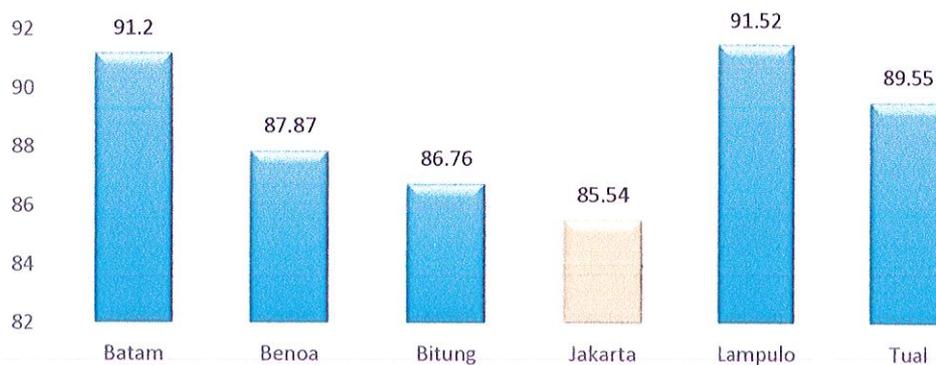
IKU	2020			2021			2022			2024
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)	-	-	-	86	86,55	100	81	85,54	106	86

Pada tahun 2020 tidak ada IKU terkait Nilai kinerja anggaran (NKA), sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini sedangkan pada tahun 2021, IKU kegiatan ini terealisasi sebesar 86,55 dengan target sebesar 86 sehingga capaian yang diperoleh adalah 100%. Target yang ditentukan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut merupakan suatu kebijakan dari eselon I atau tingkat Kementerian sehingga pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) hanya mengadopsi langsung nilai target tersebut. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar 106. Keberhasilan pada iku ini tidak lepas dari peran aktif dari koordinator tingkat Seditjen yang secara berkala mengingatkan progress nilai kinerja anggaran di aplikasi grup Whatsapp.

Pada tahun 2024 target IKU ini adalah 86. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka Pangkalan PSDKP Jakarta berpotensi untuk mencapai target IKU “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)” yang telah ditentukan pada tahun 2024. Diharapkan Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan capaian yang telah diperoleh sehingga kegiatan ini dapat terealisasi dengan baik.

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 17.210.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 17.202.500,- (99,9%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 106% dan realisasi anggaran sebesar 99,9% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien.

Capaian IKU “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)” pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan unit kerja lain yang setingkat dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, Batam, Bena, Tual dan Bitung memiliki capaian yang sama. Berikut grafik perbandingan capaian IKU “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)” dengan unit kerja lain :



Grafik 26. Perbandingan IKU 23 dengan unit kerja lain

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki capaian terendah daripada UPT lainnya. Hal ini dikarenakan terdapat komponen efisiensi yang rendah dan kurangnya kompetensi pegawai yang melakukan penginputan pada aplikasi SMART DJA.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah rapat yang diadakan oleh KPPN Jakarta VI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan pada tanggal 21 Juni 2022 dengan perihal strategi optimalisasi capaian IKPA Satker triwulan II tahun 2022.

EFISIENSI

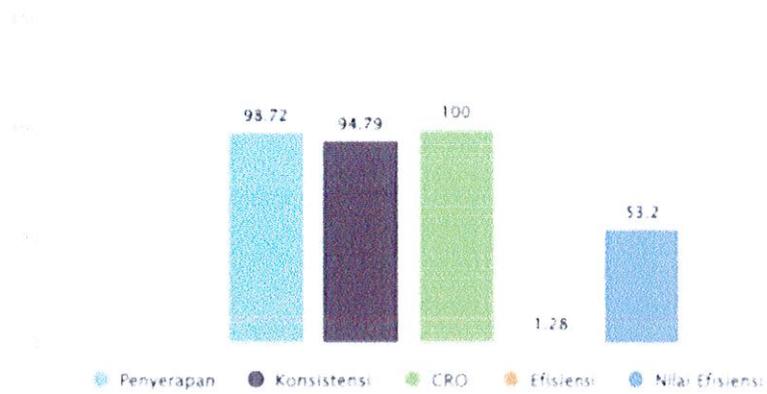
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Ditjen. PSDKP. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta berdasarkan data realisasi output KRO pada aplikasi SMART kementerian keuangan sebesar 1,28. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam penggunaan anggaran di Pangkalan PSDKP Batam efektif. Berikut rincian hasil perhitungan nilai efisiensi berdasarkan aplikasi SMART :

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA



Nilai SMART
85.54

Baik



Gambar 5. Nilai Efisiensi Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2022

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar Rp. 38.836.355.000,- dan selama periode tahun 2022 telah mengalami 13 (Tiga belas) kali revisi. Revisi anggaran dilakukan dikarenakan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran Ditjen PSDKP TA.2022 sesuai dengan surat Sekretaris Ditjen PSDKP. Perubahan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Table 44. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta per Kegiatan sampai dengan Bulan Desember 2022

Kode	Kegiatan	Pagu	Realisasi S/D Desember 2022	%
2350	Pemantauan dan Operasi Armada	15.407.516.000	15.370.839.042	99.76
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	87.121.000	87.071.927	99.94
2352	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan	189.640.000	189.637.625	100
2353	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Perikanan	1.252.510.000	1.249.501.335	99.76
2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	17.650.229.000	17.608.253.590	99.76
	Total	34.587.016.000	34.505.303.519	99.76



4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKJ) periode tahun 2022 Pangkalan PSDKP menyajikan capaian kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam setiap triwulan. Selama periode ini Pangkalan PSDKP Jakarta telah memenuhi semua target IKU yang ditentukan dengan jumlah 23 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pangkalan PSDKP Jakarta telah memenuhi seluruh capaian IKU sesuai dengan rencana dan target yang telah ditentukan pada tahun 2022.

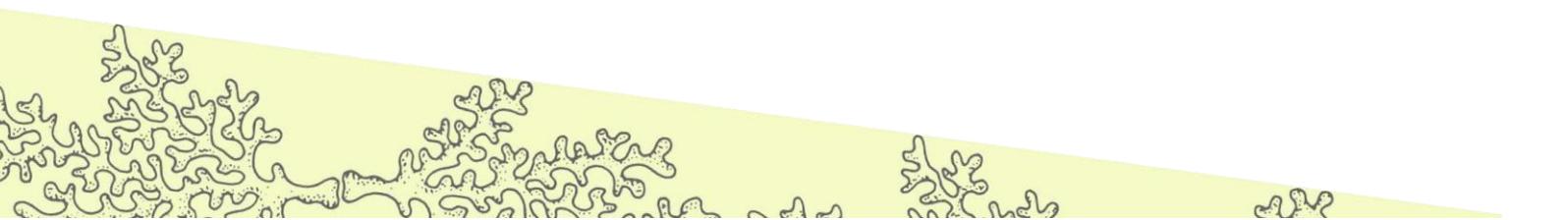
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pangkalan PSDKP Jakarta sampai dengan Desember tahun 2022 sebesar 108,44. Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut berbagai upaya telah dilakukan oleh seluruh pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta. Keberhasilan dalam setiap IKU tidak lepas dari kendala dan permasalahan yang terjadi dalam proses pemenuhan data dukung setiap triwulan. Berikut permasalahan dan kendala yang ada pada saat pemenuhan capaian IKU Pangkalan PSDKP Jakarta adalah pada tahun 2022, terdapat 1 (satu) kali revisi Perjanjian Kinerja (PK) sehingga perlu adanya reviu Rencana Strategis 2020-2024 karena masih banyak IKU yang sudah tidak relevan dengan perjanjian kinerja setelah revisi.

4.2 Rekomendasi

Upaya perbaikan dalam mengatasi kendala/permasalahan yang ada di Pangkalan PSDKP Jakarta adalah melakukan telaah terhadap renstra Pangkalan PSDKP Jakarta.

4.2 Tindak Lanjut

Rekomendasi Triwulan Sebelumnya	Tindak Lanjut Rekomendasi
Perlu adanya koordinasi dengan Direktorat PP terkait IKU efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	Pangkalan PSDKP Jakarta telah berkoordinasi dengan Direktorat PP melalui surat nomor : B. 3539/PSDKPLAN.3/TU.210/XI/2022 Dengan perihal Perubahan Volume Rincian Output (RO) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK). FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sumono Darwinto**

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Jakarta, 3 Januari 2022
Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jakarta



Sumono Darwinto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%)	100
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	87,5
		ISK3.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	87,5
		ISK3.2.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP	90
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP (%)	100
		ISK3.3.2	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	93
		ISK4.1.2	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	93
		ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	93
		ISK4.1.4	Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	80
		ISK4.1.5	Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	80
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Pendaratan Ikan) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	80
		ISK5.1.3	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	75
		ISK5.1.4	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	77
		ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	90
		ISK5.1.6	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1
		ISK5.1.7	Nilai implementasi program budaya kerja (nilai)	21
		ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	75
		ISK5.1.9	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	75
		ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	86
		ISK5.1.11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70
		ISK5.1.12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	89
		ISK5.1.13	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	81

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	411.182.000
SK1.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	2.744.359.000
SK2.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 3	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	17.159.976.000
SK3.1	<i>Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif</i>	
SK3.2	<i>Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif</i>	
SK3.3	<i>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	372.435.000
SK4.1	<i>Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif</i>	
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	17.563.043.000
SK5.1	<i>Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP</i>	
Total Anggaran		38.250.995.000

Jakarta, 3 Januari 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jakarta



Sumono Darwinto



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditiensdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sumono Darwinto**

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

Jakarta, 16 Desember 2022
Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jakarta

Sumono Darwinto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%)	100
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	85
		ISK3.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	85
		ISK3.2.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP	90
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100
		ISK3.3.2	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.4	Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	80
		ISK4.1.5	Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	80
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	
		ISK5.1.3 Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	75
		ISK5.1.4 Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	77
		ISK5.1.5 Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	90
		ISK5.1.6 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	21
		ISK5.1.7 Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)	1
		ISK5.1.8 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	75
		ISK5.1.9 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	75
		ISK5.1.10 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	86
		ISK5.1.11 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70
		ISK5.1.12 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	89
		ISK5.1.13 Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	81

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	189.640.000
SK1.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.252.510.000
SK2.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 3	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	15.407.516.000
SK3.1	<i>Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif</i>	
SK3.2	<i>Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif</i>	
SK3.3	<i>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	87.121.000
SK4.1	<i>Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif</i>	
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	17.650.229.000
SK5.1	<i>Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP</i>	
Total Anggaran		34.587.016.000

Jakarta, 16 Desember 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jakarta



Sumono Darwinto